



DINAMIKA GERWANI DI KOTA SEMARANG TAHUN 1954-1965

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, dan untuk mencapai gelar sarjana pendidikan

Oleh

Qothrun Nada

NIM. 100210302075

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu turunkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita pada jalan yang terang benderang di muka bumi ini. Dengan segala ketulusan dan keikhlasan, kupersembahkan karya ini kepada:

- 1) Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mahfud Muhajar dan Ibunda Siti Khodijah yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, doa, dan motivasi agar mencapai kesuksesan.
- 2) Kakekku tercinta H. Nur Hasan yang selalu memberikan doanya untukku.
- 3) Untuk almamaterku tercinta Universitas Jember Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang kubanggakan.

MOTTO

"Mimpi berawal dari seorang guru yang mempercayaimu, yang menarik, mendorong, dan membawamu ke dataran tinggi, kadang ia juga menusukmu dengan tombak tajam tajam bernama kebenaran".



**) Put Mu'inah*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qothrun Nada

NIM : 100210302075

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Dinamika Gerwani Di Kota Semarang Tahun 1954-1965”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 November
2016

Yang menyatakan,

Qothrun Nada

NIM. 100210302075

SKRIPSI

DINAMIKA GERWANI DI KOTA SEMARANG TAHUN 1954-1965

Oleh

Qothrun Nada

NIM 100210302075

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Sugiyanto, M, Hum

Dosen Pembimbing II : Drs. Kayan Swastika, M. Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Dinamika Gerwani Di Kota Semarang Tahun 1954-1965* telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 21 November 2016

Tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Sugiyano, M, Hum

Drs. Kayan Swastika, M. Si

NIP. 195702201985031003

NIP. 196702102002121002

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Nurul Umamah, M. pd

Drs. Sumarjono, M. Si

NIP. 196902041993032008

NIP. 195808231987021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs Dafik, M.Sc., Ph.D

NIP. 196808021993031004

RINGKASAN

Dinamika Gerwani Dikota Semarang Tahun 1954-1965

Gerwani merupakan kelanjutan dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1950, di Semarang. Sedangkan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) berdiri pada tahun 1954, yang berasal dari peleburan beberapa organisasi perempuan yang memiliki kesadaran perjuangan dan kesadaran politik yang tinggi menolak posisi perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki..

Kota Semarang dipilih sebagai basis Gerwis, karena secara historis merupakan “Kota Merah” dan di kota inilah lahirnya PKI. Gerwani memiliki keinginan yang kuat untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan, menolak dan mengakhiri berbagai praktik feodalisme yang masih ada dalam kehidupan masyarakat. Gerwani juga berjuang untuk kepentingan kaum perempuan dan anak. Gerwani tidak berpihak pada kepentingan salah satu agama, kedudukan dan status sosial di masyarakat.

Akhir perjuangan Gerwani terkait dengan tragedi 30 September 1965 yang sering disebut G 30 S, merupakan awal berakhirnya perjuangan Gerwani di Semarang. Ketidakpastian hukum membuat Gerwani dianggap sebagai salah satu organisasi terlarang yang sama dengan PKI. Masyarakat anti komunis, TNI dan Pemuda Ansor menangkap anggota/simpatikan Gerwani, kemudian dipenjarakan ke Kamp Plantungan yang berada di Kendal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana latar belakang berdirinya organisasi Gerwani di kota Semarang?; (2) Bagaimana dinamika organisasi, keanggotaan dan program kerja Gerwani di kota Semarang pada tahun 1954 sampai pada tahun 1965?.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan mengungkap latar belakang berdirinya Gerwani di kota Semarang; (2) untuk mengetahui dinamika organisasi, keanggotaan dan program kerja Gerwani di kota Semarang pada tahun 1954 sampai pada tahun 1965.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari kegiatan heuristik, kritik interpretasi dan historiografi. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Pendidikan Sejarah, Perpustakaan Sastra Sejarah, Museum Mandala Bakti atau Kodam IV Semarang. Museum Ranggawarsita Semarang, Perpustakaan Universitas Diponegoro, Perpustakaan Daerah Semarang dan melakukan beberapa wawancara dengan narasumber.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pada tahun 1954, sejalan dengan perkembangan politik dan kepentingan untuk memperluas keanggotaannya dari golongan menengah bawah, sehingga Gerwis berubah nama menjadi Gerwani. Kemudian sejak dilakukannya perubahan nama organisasi tersebut, Gerwani menjadi organisasi yang sangat dekat dengan rakyat khususnya kaum perempuan dan pada akhirnya organisasi ini menjadi lebih luas, sehingga mampu mendirikan cabang di berbagai daerah. Gerwani merupakan organisasi massa, yang bergerak untuk kepentingan perempuan dan masyarakat yang tertindas tanpa membedakan status dan golongan masyarakat. Gerwani berdiri dengan dipimpin oleh Umi Sardjono dan wakilnya S.K. Trimurti, mereka berjuang demi kepentingan kaum perempuan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang hendak penulis kemukakan adalah (1) Bagi mahasiswa calon guru sejarah, selain berusaha lebih mendalami dan menguasai materi sejarah dapat juga menambah wawasan pengetahuan tentang perjuangan Gerwani dalam memperjuangkan kaum perempuan. (2) Bagi almamater, ada baiknya jika menambah dan meningkatkan perbendaharaan literatur sejarah dan dapat memberi informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam rangka pelaksanaan Tri darma Perguruan Tinggi yaitu dharma penelitian yang selanjutnya penelitian ini akan menambah koleksi perpustakaan Universitas Jember.

PRAKATA

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Nilai Karakter Tokoh Werkudara Dalam Pembelajaran Sejarah”. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1) Drs. Moh Hasan, M, Sc. Pd. D, selaku Rektor Universitas Jember
- 2) Prof. Drs Datik, M.Sc., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.
- 3) Drs. Pudjo Suharso, M. Si, selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- 4) Dr. Nurul Umamah, M. Pd, selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah.
- 5) Drs. Sugiyanto, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran, serta selalu mengingatkan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi.
- 6) Drs. Kayan Swastika, M. Si, selaku Dosen Pembimbing II dan dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
- 7) Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang dengan ikhlas memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa.
- 8) Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Mahfud Muhajar dan Ibu Siti Khodijah semua doa, harapan, kerja keras, perjuangan ayah dan ibu tidak akan sia-sia, putramu kan selalu membuatmu bangga serta kakekku

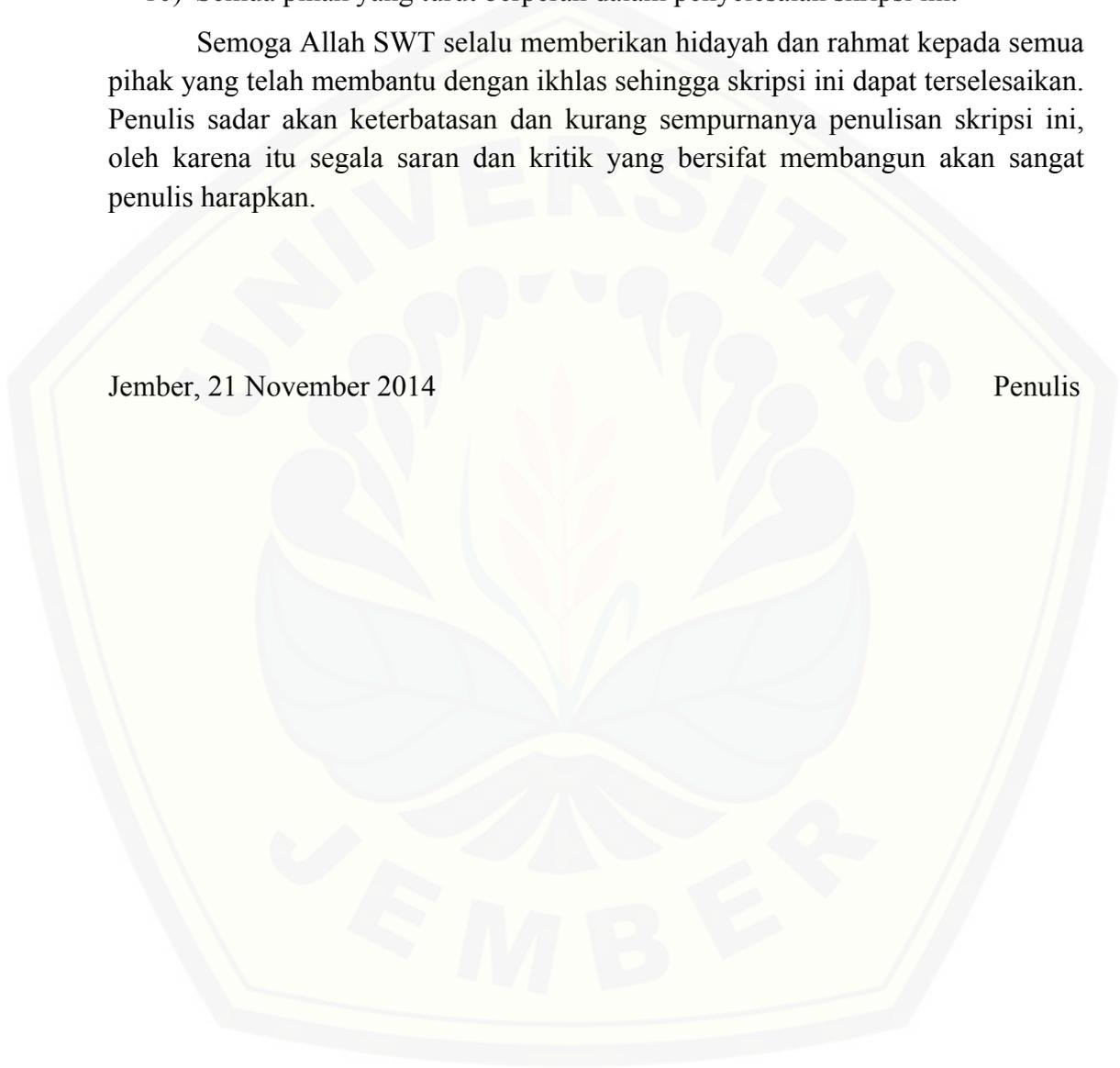
tercinta H. Nur Hasan yang senantiasa memberi doa, cinta kasih, dan dukungan bagiku dalam setiap kesempatan.

- 9) Teman-teman pendidikan sejarah angkatan 2010 kelas A maupun kelas B yang senantiasa memberikan semangat.
- 10) Semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan.

Jember, 21 November 2014

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN RINGKASAN	viii
HALAMAN PRAKATA	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang Masalah	1
1. 2 Penegasan Pengertian Judul	5
1. 3 Ruang Lingkup Permasalahan	6
1. 4 Rumusan Masalah	6
1. 5 Tujuan Penelitian	7
1. 6 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PENELITIAN	8
BAB 3. METODE PENELITIAN	14
3. 1 Heuristik	14
3. 2 Kritik	15

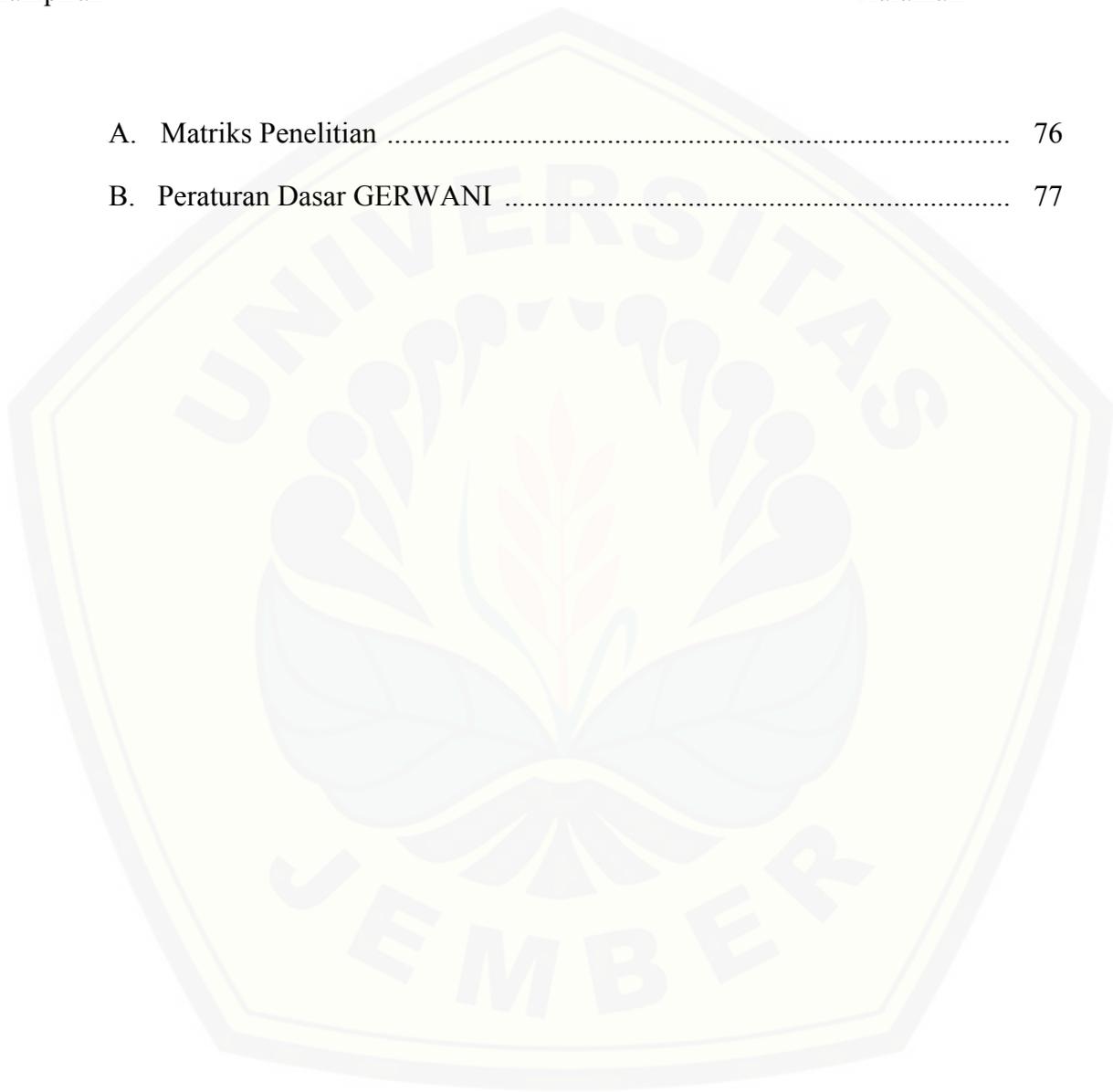
3.3 Interpretasi	16
3.4 Historiografi	16
BAB 4. LATAR BELAKANG BERDIRINYA ORGANISASI GERWANI DI KOTA SEMARANG.....	18
4.1 Latar Belakang Geografis	18
4.2 Latar Belakang Sosial Ekonomi Dan Budaya	19
4.3 Latar Belakang Politik	30
BAB 5. DINAMIKA ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN PROGRAM KERJA GERWANI DI KOTA SEMARANG PADA TAHUN 1954 SAMPAI PADA TAHUN 1965	44
5.1 Dinamika Organisasi Dan Keanggotaan Gerwani	44
5.2 Dinamika Program Kerja Gerwani	52
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	8
6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Tabel 4. 2. 1. Jenis Dan Tempat Pasar Tradisional Di Kota Semarang	23
Tabel 4. 2. 2. Macam-macam Gedung Kesenian	25
Tabel 4. 3. 1. Hasil Pemungutan Suara Tahun 1955 Untuk Anggota DPR Di Tiap-tiap Kecamatan Kota Semarang	42
Bagan 5. 1. 1. Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerwani Tahun 1954-1965	25
Bagan 5. 1. 2. Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Harian Gerwani	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A. Matriks Penelitian	76
B. Peraturan Dasar GERWANI	77



BAB 1. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Pergerakan perempuan Indonesia telah melewati perjalanan sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah banyak muncul tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi perempuan dibangun untuk kepentingan kaum perempuan, perempuan memperjuangkan posisi di dalam perkawinan dan kehidupan keluarganya, mempertinggi kecakapan dan pemahaman ibu sebagai pemegang dan yang menentukan jalannya rumah tangga dalam suatu keluarga (Wieringa, 1999:200). Dengan jalan menambah lapangan pengajaran, memperbaiki pendidikan, dan mempertinggi kecakapan-kecakapan sebagai perempuan, hal itu merupakan yang utama bagi organisasi tersebut. Organisasi yang ada di Indonesia seperti Gerwani pada mulanya adalah independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialis dan feminis.

Gerakan perempuan sejatinya bukanlah gerakan balas dendam demi meruntuhkan eksistensi laki-laki dalam kiprahnya menjalankan sistem dan struktur sosial maupun dunia, namun merupakan perjuangan kaum wanita sebagai gerakan komunis yang eksis. Gerakan feminis adalah murni mengedepankan aspek kesamarataan peran dan hak dalam mengaktualisasikan diri sebagai kebutuhan manusia yang paling puncak. Kesamarataan tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, budaya, ideologi dan lingkungan. Pemikiran feminisme menyatakan telah terjadinya diskriminasi dan ketidaksamaan yang melahirkan ketidakadilan oleh sebab konsep objektivitas yang selalu lahir dari pemikiran dan pengalaman kaum laki-laki. Seringkali orang menyebutkan kata-kata “perempuan harusnya ya di dapur dan ranjang laki-laki”, perempuan dianggap tidak pantas sejajar dengan laki-laki dalam hal apapun. “Pokoknya istri di rumah masak, cuci baju, cuci piring, urus anak, belanja, dan sebagainya. sementara suami cari nafkah”, inilah konsep objektivitas yang dibangun kaum laki-laki, sehingga kaum feminis lebih suka melihat konsep tersebut sebagai konsep yang subjektif. Semua

standar ditetapkan oleh laki-laki yang kebanyakan tidak mengakomodir upaya aktualisasi kaum perempuan.

Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) adalah organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1954-an dan 1965-an. Tahun 1954 merupakan awal terbentuknya organisasi Gerakan Wanita Indonesia yang oleh masyarakat lebih kenal dengan GERWANI. Kelompok ini memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia, namun sebenarnya merupakan organisasi independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminisme (Wieringa, 1999:245). Organisasi ini bisa dikatakan organisasi pertama yang mencoba mendobrak kodrat perempuan. Mereka memprotes setiap hal-hal yang merugikan perempuan. Organisasi ini mengajarkan perempuan untuk berpikir maju kedepan. Tidak hanya monoton padatugasnya sebagai ibu rumah tangga. Organisasi ini mencoba memperjuangkan hak-hak perempuan, namun sebenarnya merupakan organisasi independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminisme (gerakan wanita yang menuntut persamaan hak Sepenuhnya antara wanita dan laki-laki).

Gerwani mendapatkan inspirasinya dari pemikiran sosialis dan bertalian erat dengan PKI. Dalam hubungannya antara Feminisme dengan Marxisme, mereka bergulat dengan sejumlah persoalan teori. Dua hal penting yang menarik dari Marxisme bagi kaum feminis ialah kemungkinan perubahan sosial yang meningkat serta teori tentang sejarah keluarga yang menjurus pada celaan terhadap pandangan esensialis. Dapat diduga bahwa awal keberadaan organisasi-organisasi perempuan semacam ini di Hindia Belanda (tahun 1910-an) berkaitan erat dengan dipromosikannya politik “Hutang Budi” (Politik Etik) oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Pemerintah Kolonial dan para pejabatnya masa itu percaya bahwa modernisme (ala Barat) mampu mengantar ke “pencerahan akal budi”. Pencerahan akal seperti itulah yang dipercayai akan menghasilkan kebaikan karena “kepandaian adalah pangkal keselarasan, dan kebodohan adalah pertanda kekacauan” (Wierenga, 1999:82).

Gerwani mencoba memperjuangkan hak-hak wanita yang selama ini tertindas dari kaum pria, mulai dari masalah poligami hingga peningkatan

pendidikan bagi wanita. Dalam gerakan politik praktis yang legal formal, kaum wanita untuk pertama kalinya menyatakan berposisi dengan kekuasaan pemerintah pada tahun 1935 ketika pemerintah kolonial menolak permintaan kaum wanita untuk memilih wanita pribumi sebagai wakil dalam Dewan Rakyat. kemudian pada 8 Agustus 1938 wanita Indonesia mengorganisasi lagi pertemuan untuk mengadakan protes terhadap pemerintah yang diikuti oleh 18 organisasi wanita. Para organisasi wanita tersebut memprotes pemerintah yang tetap saja memilih wanita Belanda sebagai anggota Dewan Rakyat. Organisasi wanita di Hindia Belanda boleh dikatakan tidak begitu aktif lagi setelah aksi protes tersebut hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.

Jika dicermati lebih dalam lagi sejarah gerakan kaum wanita dapat dikemukakan bahwa pada mulanya lebih tertuju pada bidang pendidikan. Hal ini tampaknya didasari oleh kesadaran bahwa pendidikan dapat membawa pengaruh yang besar pada perubahan dan kemajuan. Oleh karena itu bukanlah tanpa sebab jika tokoh-tokoh wanita yang terkemuka dalam masyarakat Indonesia pada mulanya bergerak dibidang pendidikan. Rohanna Kudus dan Rahma El Yunusiyah merupakan tokoh wanita di Sumatera Barat yang giat memajukan pendidikan seperti Maria Walanda Maramis di Sulawesi Utara. Demikian pula halnya, organisasi-organisasi wanita yang pertama-tama dibentuk, kegiatannya terutama dalam usaha bagaimana meningkatkan kepandaian wanita, sehingga peranannya pun akan semakin besar. Menurut Saskia Wierenga (1999:58) dalam banyak hal, sejarah Gerwani gerakan perempuan Indonesia dan kudeta dimodifikasi oleh sejarawan di masa Orde Baru dan menurut Diniyah (2007:171) hubungan antara Gewani dan PKI berlangsung sejak Aidit terpilih menjadi pimpinan PKI dan selalu membahas tentang masalah perempuan untuk berjuang bersama membentuk sosialisme.

Setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan, semua organisasi wanita tersebut diafiliasikan ke dalam suatu organisasi yang lebih besar dan merupakan induk dari seluruh organisasi wanita di Indonesia yang diberi nama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). KOWANI didirikan di Surabaya pada awal bulan

Juni tahun 1950, ketuanya adalah Nyi Puger, wakil ketua Ny. Dr. Angka Nitisastra, penulis Ny. Irang, dan anggota luar biasa Ny. Samadikun. Dalam rapat pembentukan itu juga dibentuk Panitia Pembantu Sosial yang anggotanya terdiri dari perhimpunan yang punya usaha kesosialan guna mendampingi dan membantu melaksanakan pekerjaan pemerintah di lapangan sosial. Sejak saat itu organisasi wanita menjadi tersentralisasi dan kegiatannya lebih ditentukan oleh induk organisasinya, sehingga tidak dapat lagi semerdeka seperti sebelumnya.

Gerwani tetap berpegang pada prinsip organisasi yang berpegang teguh pada kekuasaan tertinggi, yang berada pada sentralisasi kepemimpinan yang sangat kuat, dan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan terpenting yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat. Khususnya yang menyangkut kebijakan nasional, arti penting kampanye-kampanye tertentu, hubungan dengan organisasi-organisasi perempuan lain, dan kedekatannya dengan PKI (Diniah, 2007:186).

Studi tentang Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) diteliti karena merupakan sejarah yang sampai saat ini masih belum terungkap dengan jelas bagaimanakah aksi Gerwani setelah terbentuk dan juga menurut penulis masih banyak yang menilai Gerwani sebagai gerakan yang negatif bagi bangsa Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Gerwani. Disini penulis mencoba meneliti Gerakan Wanita Indonesia yang berada di kota Semarang, pemilihan kota Semarang dikarenakan kota ini adalah awal lahirnya PKI atau yang biasa orang sebut dengan Kota Merah. Kemudian pada 4 Juni 1950 di kota Semarang meleburlah enam organisasi perempuan ke dalam satu wadah tunggal, yaitu Gerwis yang nantinya menjadi cikal bakal Gerwani. Kota Semarang dipilih sebagai basis Gerwis, karena secara historis merupakan “Kota Merah” di kota inilah lahirnya PKI. Enam organisasi yang meleburkan diri tersebut ialah Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah dinamika gerakan wanita indonesia di kota Semarang mulai tahun 1954

sampai 1965, dengan pertimbangan studi mengenai dinamika Gerwani di kota Semarang tahun 1954-1965 belum pernah diteliti sebagai kajian ilmiah, untuk mengetahui awal terbentuknya Gerwani dan hubungannya dengan PKI, dan untuk mengetahui apa-apa saja program kerjanya sesudah Gerwani terbentuk.

1. 2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penulis. Oleh karena itu penulis menguraikan pengertian judul **“Dinamika GERWANI Di Kota Semarang Tahun 1954-1965”**.

Pengertian dinamika menurut Kuntowijoyo (2001:15) adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika juga terjadinya proses perkembangan, perubahan, kesinambungan ataupun perulangan, sehingga dinamika dapat disimpulkan sebagai sebuah perkembangan secara berkesinambungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks (Kuntowijoyo, 2001:14). Sedangkan perubahan diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja taklukan, Belanda meniru raja-raja pribumi (Kuntowijoyo, 2001:15). Sementara itu disebut pengulangan apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya.

Gerwani merupakan organisasi massa, yang bergerak untuk kepentingan perempuan dan masyarakat yang tertindas tanpa membedakan status golongan masyarakat. Gerwani berdiri dengan dipimpin oleh Umi Sardjono dan wakilnya S.

K. Trimurti, mereka berjuang demi kepentingan kaum perempuan seperti yang diungkapkan Wierenga (1999:304-305).

Gerwani memadukan antara alasan esensialisme (sebagai Ibu) dengan penekanan pada persaudaraan kaum perempuan. Meski kurang dari target, pengabdian Gerwani mencapai peningkatan yang luar biasa bagi rata-rata organisasi. Bagi para kader yang bekerja di tengah masyarakat yang tidak setuju dengan perempuan yang melepaskan diri dari apa yang dianggap sebagai “kodrat wanita”, pekerjaan rumah tangga mereka tidak dapat dikalahkan dengan oleh tugas organisasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dikatakan bahwa Dinamika GERWANI di kota Semarang tahun 1954-1965 adalah gerak dan perkembangan GERWANI di kota Semarang yang terjadi antara tahun 1954 hingga tahun 1965 dalam tujuannya untuk membela kepentingan perempuan.

1. 3 Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup dimaksudkan agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari rumusan permasalahan. Oleh karena itu penulis membatasi ruang lingkup materi dan waktu.

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah aktivitas Gerwani dari tahun 1954 sampai 1965, khususnya mengenai aktivitas pergerakannya dalam bidang politik serta dalam bidang sosial yang nantinya akan banyak mempengaruhi kesetaraan Gender di Indonesia.

Ruang lingkup waktu (temporal) dalam penelitian ini dibatasi pada tahun 1954-1965. Tahun 1954 dijadikan batas awal penelitian karena tahun tersebut merupakan awal terbentuknya (GERWANI) Gerakan Wanita Indonesia. Ini terbukti dari Kongres perempuan ke II yang temanya pada waktu itu ialah Hak perempuan dan anak-anak. Sesuai dengan keputusan kongres Gerwis (gerakan wanita sadar) berubah menjadi Gerwani (gerakan wanita Indonesia). Sedangkan batas akhir dari penelitian ini yaitu pada tahun 1965 karena terkait dengan terjadinya peristiwa G30S yang berakibat awal berakhirnya organisasi Gerwani, karena organisasi tersebut sebagai underbow / bawahan PKI.

1. 4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

- 1) Bagaimanakah latar belakang berdirinya organisasi Gerwani di kota Semarang?
- 2) Bagaimanakah dinamika organisasi, keanggotaan dan program kerja Gerwani di kota Semarang pada tahun 1954 sampai pada tahun 1965?

1. 5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti ialah;

- 1) Untuk mengetahui dan mengungkap latar belakang berdirinya Gerwani di kota Semarang.
- 2) Untuk mengetahui dinamika organisasi, keanggotaan dan program kerja Gerwani di kota Semarang pada tahun 1954 sampai pada tahun 1965.

1. 6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah;

- 1) Bagi ilmu pengetahuan, dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Dinamika GERWANI di kota Semarang tahun 1954-1965.
- 2) Bagi mahasiswa Prodi Sejarah dapat menambah wawasan pengetahuan tentang perjuangan GERWANI dalam memperjuangkan kaum perempuan.
- 3) Bagi FKIP Universitas Jember, dapat memberi informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu dharma penelitian yang selanjutnya penelitian ini akan menambah koleksi perpustakaan Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengemukakan tentang pendapat dari berbagai para ahli dan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan masalah yang dibahas, kajian teori dilakukan dengan mengumpulkan pendapat atau teori-teori yang dikemukakan para peneliti sebelumnya. Dinamika GERWANI di kota Semarang tahun 1954-1965, baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan, misalnya berupa laporan penelitian maupun skripsi.

Gerakan kaum wanita yang terorganisasi dalam Gerwani memiliki ruanglingkup yang disebut feminisme. Feminisme adalah gerakan yang berasal dari Barat. Dari bahasanya saja sudah jelas, gerakan itu bukan datang dari Indonesia. Konon gerakan feminisme sudah mulai tumbuh sejak pertengahan abad ke-19. Secara umum, feminisme adalah ideologi kebebasan perempuan dengan pendekatan percaya bahwa kesengsaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan karena seksualitasnya. Ada berbagai ragam pengertian feminisme, biasanya tempat dan waktu juga mempengaruhi tentang konsep feminisme. Namun hakikat makna dari feminisme adalah menuntut kebebasan, menuntut persamaan hak dan keadilan sosial bagi perempuan (Irwan, 2009:38).

Feminis Marxis mengatakan bahwa subordinasi perempuan melayani kebutuhan akan kapitalisme, sebagai contohnya karena ketergantungan ekonomi kaum perempuan pada suaminya, sehingga perempuan sebagai istri membentuk semacam tenaga kerja cadangan yang sewaktu – waktu bisa digunakan dalam pasar tenaga kerja. Beda halnya dengan Feminisme Radikal aliran ini bersifat “*Patriarki*” yang berarti kekuasaan laki-laki atas perempuan, bagi feminis radikal, bukan sistem ekonomi yang menindas perempuan, melainkan laki-lakilah yang menindas perempuan (Saifuddin, 2010:129).

Hubungan antara Gerwani dan Sukarno selaku bapak bangsa, dalam beberapa buku Sukarno menyatakan gerakan wanita Indonesia bukan lagi *Ladies Movement* atau *Ndoro Den Ayu*, maka perjuangan melawan laki-laki harus dihentikan dan bekerja bagi persatuan total dengan poros Nasakom untuk

mengembalikan Irian Barat ke pangkuan bangsa. Dukungan Gerwani terhadap Demokrasi Terpimpin menjanjikan kemungkinan lebih luas bagi aksi-aksi melawan kaum pemberontak PRRI/Pemesta. Dukungan ini bukanlah tanpa syarat, sebagai imbalannya Gerwani menghendaki lebih banyak menteri perempuan dalam kabinet baru serta Undang-Undang Perkawinan Demokratis.

Sebagai usaha untuk menghindari kerancuan objek studi dan juga untuk memperkaya materi penulisan, maka dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa buku yang relevan. Buku pertama berjudul Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia oleh Kongres Wanita Indonesia (1978). Buku ini memuat sejarah pergerakan wanita di Indonesia secara kronologi di mulai saat kongres pertama tahun 1928, yang merupakan suatu tonggak sejarah penting bagi kesatuan pergerakan wanita Indonesia.

Sumber yang digunakan sebagai bahan penyusunan buku ini cukup akurat, banyak didukung sumber-sumber primer seperti wawancara dengan bekas tokoh-tokoh wanita yang terlibat langsung. Sumber lain yang digunakan adalah surat kabar sejaman, autobiografi, dan pendukung lain yang mempunyai relevansi dengan isi buku. Penulisan dalam buku ini menggunakan tata kalimat secara lugas agar mudah dipahami. Kelemahan buku ini antara lain secara substansial hanya merupakan deskripsi umum yang bersifat makro, karena begitu panjang rentang waktu atau periode yang dicakup dengan tema umum dan luas. Secara kuantitas terlalu tebal karena memuat semua hasil Kongres Wanita Indonesia sampai tahun 1978.

Saskia E Wierenga (2010) dalam bukunya yang berjudul *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* membahas mengenai proses penataan kembali hubungan gender dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia. Secara umum buku ini membahas mengenai penelitian tentang gender dan gerakan perempuan Indonesia menjelang abad 20 sampai tahun 1965. Secara khusus membahas mengenai Gerwani mulai dari berdirinya, ideologi dan perkembangannya, sampai dengan peristiwa 30 September 1965. Buku ini dapat memberi sumbangan penting, khususnya pada saat ada keinginan dari kalangan sejarawan untuk mengkaji ulang sejarah formal yang telah dibakukan penguasa selama ini. Dengan

paradigma gender, penulis buku ini bukan hanya berhasil melakukan penelusuran sejarah yang tersembunyi tentang gerakan perempuan di Indonesia, tapi juga menrekonstruksi bangunan berpikir sebuah masyarakat dari rezim yang memperlihatkan dominasi “berpikir laki-laki”.

Dalam buku tersebut juga menjelaskan bagaimana perjuangan Gerakan perempuan yang berjuang untuk penghapusan undang-undang kolonial, *Inlansche Gemeente Ordonantia No.112* melarang perempuan menjabat kepala desa (peraturan tersebut dibuat pada 1907 yang kemudian dirujuk sebagai hukum IGO/B). Akhirnya pada 1958 ketika tiga perempuan terpilih sebagai kepala desa tetapi tidak di ijinakan menduduki tempatnya.

Hubungan antara Gerwani dengan PKI ini diawali dari para sejumlah perempuan komunis yang ikut serta dalam mendirikan Gerwis, yaitu organisasi perempuan yang menjadi cikal bakal terbentuknya Gerwani. Para anggota Gerwani mendukung PKI, karena mereka merasa program PKI menjamin emansipasi dan hak setara bagi perempuan terutama bagi kaum miskin. Mulai tahun 1960 Gerwani semakin berada dibawah kendali Ideologi PKI, Semenjak tahun 1960 dan seterusnya Gerwani makin berada di bawah kendali ideologi PKI, sementara partai sendiri tidak banyak memberikan perhatiannya terhadap isu-isu perempuan dan tidak memasukannya ke dalam masalah-maslaah umum karena bukanlah gender yang menjadi penyebab krimpangan dalam masyarakat, tapi diskriminasi terhadap kaum wanita, namun semuanya ini merupakan bagian dari sistem penindasan pembagian kelas dalam masyarakat.

Hikmah Diniyah dalam bukunya *GERWANI bukan PKI* membahas mengenai GERWANI merupakan organisasi yang memiliki arah perjuangan berbasis massa dan berbentuk organisasi massa (ORMAS), sehingga siapapun dan dari golongan manapun boleh menjadi anggotanya. Pada awala berdirinya, Gerwani telah melakukan hubungan kerja sama dengan organisasi perempuan yang juga aktif pada tahun 1950-an. Disaat Kongres Wanita Indonesia masih aktif, para anggota Gerwani selalu berada di garis depan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia dan pimpinan Gerwani memiliki hubungan kerja yang sangat erat.

Perkembangan Gerwani mengarah ke pergerakan perjuangan, kemudian pada akhirnya lebih condong dan masuk ke dalam masalah politik nasional yang berhubungan dengan Demokrasi Terpimpin pada masa Presiden Soekarno, yang didukung oleh kekuatan PKI. Hal ini sangat mempengaruhi langkah-langkah perjuangan bagi para aktivis Gerwani dengan berkonsentrasi pada garis perjuangan yang ditetapkan Soekarno dan Aidit.

Pada perkembangannya sebagian besar anggota GERWANI merupakan anggota PKI itu disebabkan beberapa persamaan tujuan organisasi. Akhirnya, dengan semakin kuatnya PKI dalam tubuh GERWANI, maka secara resmi pada kongres V diambil keputusan untuk melebur menjadi satu dengan partai yang bertujuan memperkuat organisasinya. Akan tetapi rencana itu gagal karena GERWANI dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena terlibat dalam pembunuhan tujuh jenderal.

Saskia Wierenga juga dalam bukunya yang berjudul *Kuntulanak Wangi* membahas bahwa pada tahun 1961 anggota organisasi mencapai lebih dari satu juta jiwa orang. Cabang-cabang didirikan di seluruh penjuru negeri. Kaum perempuan tertarik pada organisasi ini semata-mata oleh karena kegiatannya yang menyangkut kebutuhan sehari-hari mereka. Warung-warung koperasi dan koperasi simpan-pinjam didirikan. Perempuan tani dan buruh disokong dalam sengketa mereka dengan tuan tanah atau majikan pabrik tempat mereka bekerja. Taman kanak-kanak diselenggarakan di pasar-pasar, perkebunan-perkebunan, kampung-kampung. Kaum perempuan dididik untuk menjadi guru pada sekolah-sekolah ini. Dibuka pula badan-badan penyuluh perkawinan yang menghadapi masalah perkawinan. Kursus-kursus kader dibuka pada berbagai tingkat organisasi, dan dalam kursus-kursus ini digunakan buku-buku tulisan Friedrich Engels, August Bebel, Clara Zetkin, dan Soekarno. Pada hal ini juga diajarkan keterampilan teknis, misalnya tata buku dan manajemen. Hal penting lain yang diajarkan adalah sejarah gerakan perempuan Indonesia.

Rina Rahmawati (2008) dalam laporan penelitiannya yang berjudul *Keberadaan Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) Cabang Blitar Tahun 1957-1965* menjelaskan bahwa tujuan awal dari organisasi GERWANI adalah untuk

berjuang dan mendekati kaum perempuan miskin. Pimpinan GERWANI juga menekankan pentingnya arti kerja sama dengan organisasi perempuan lain atas dasar menghormati perbedaan yang ada dan juga gerakan perempuan jangan hanya bersifat atau bergerak pada kepentingan perempuan saja. Perjuangan Gerwani bukan hanya mengenai Gender saja ini terbukti dengan memberikan kepada masyarakat kecil (petani atau buruh), yaitu mengenai sistem bagi hasil. Misalnya bagi hasil panen padi. Apabila jumlah panen itu ada 6 karung maka yang 3 karung milik penggarap lahan, untuk penggarap masih dibagi lagi dengan pemanen padi sehingga untuk penggarap mendapat 2 sedangkan 1 untuk pemanen. Itu merupakan perjuangan bagi hasil pertanian dan hal tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Dari beberapa sumber yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Gerwani memiliki hubungan erat dengan PKI, hal ini tercermin dari keberadaan tokoh-tokoh Gerwis (cikal balak terbentuknya Gerwani) yang sebagian besar anggota PKI. Apalagi semenjak Aidit terpilih menjadi pemimpin PKI (partai komunis Indonesia) pada tahun 1951. Saat itu Aidit memiliki keinginan untuk menjadikan Gerwani sebagai organisasi masa PKI. Dalam berbagai pidatonya, Aidit selalu membahas masalah perempuan dan mengajak kaum perempuan berjuang bersama kaum sosialisme dengan menyerukan partainya adalah satu-satunya partai yang konsekuen berjuang untuk sosialisme.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan sosiologi politik adalah suatu pendekatan yang menyoroiti fenomena kekuasaan ditingkat masyarakat baik berupa suku, Negara, organisasi maupun gerakan sosial dan lembaga yang terlibat secara langsung dalam penentuan (Bottomore, 1992:V). Sosiologi politik menurut Duverger (2007:17) adalah ilmu tentang pemerintahan, kekuasaan, otoritas komondadi dalam masyarakat nasional. Pendekatan ini digunakan berdasarkan pada kenyataan bahwa masalah yang akan dibahas menyangkut masalah sosial dan politik. Masalah sosial menyangkut masyarakat yang ikut serta dan berpartisipasi dalam sebuah organisasi dan masalah politik menyangkut kegiatan yang dilakukan oleh organisasi massa yang berkaitan dalam lingkup politik. Dalam hal ini organisasi tersebut adalah Gerwani.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori feminis yang dikemukakan oleh Jagger dalam bukunya Ben Agger (2007:214-215) yang mengatakan bahwa teori feminis mengembangkan perbedaan, yang oleh perempuan dianggap bukan sebagai hal yang buruk, namun sebagai satu bentuk apresiasi heterogenitas dunia maupun refleksi posisi subjek yang berbeda yang dimiliki kaum feminis sehingga menimbulkan cara berbeda dalam menteorikan kondisi para perempuan.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Sebelum melakukan penelitian, sangat penting untuk memperhatikan metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah. Metode penelitian sejarah adalah cara penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau suatu masalah dari perspektif sejarah berupa petunjuk khusus tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah (Kuntowijoyo, 2003:19). Penelitian yang bertujuan untuk menyusun cerita sejarah yang sistematis dan objektif diperlukan metode sejarah yang merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman peninggalan masa lalu (Gottschalk, 1986:32).

Metode penelitian merupakan suatu cara yang telah teratur untuk memperoleh data atau informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, menetapkan masalah, dan mengembangkan suatu bidang ilmu pengetahuan yang dilakukan secara kritis, sistematis dan cermat seperti yang diungkapkan Widja (1982:2). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah karena sesuai dengan bidang keilmuan peneliti dan tujuan dari peneliti adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau yang memperhatikan kausalitas seluruh aktifitas manusia dalam urutan kejadian dan latar waktu tertentu seperti yang diungkapkan Gottschalk (1986:34). Ada empat langkah dalam metode sejarah yaitu sebagai berikut;

3. 1 Heuristik

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah Heuristik yaitu upaya untuk menelusuri, mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang diperoleh penulis melalui penelusuran dokumen yang tersimpan di Arsip Daerah Jawa Tengah, Arsip Museum Mandhala Bhakti Semarang, Arsip Museum Ronggowarsito Semarang dan dari beberapa sumber lisan yaitu melalui interview di lapangan terhadap orang-orang yang terlibat, diantaranya para anggota gerwani dan para anggota yang waktu itu sebagai saksi.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber Primer dan sumber Sekunder. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk menemukan sumber-sumber primer namun dapat juga memanfaatkan sumber sekunder untuk melengkapi kekurangan yang terjadi di dalam hubungannya dengan peristiwa.

Sumber primer didapat dengan mencari sumber diperbagai tempat tersimpan dan tersedianya dokumen dan pustaka. Menurut Kartodirjo (1990:16) dikatakan bahwa metode dokumenter adalah metode pengumpulan dan melalui peninggalan tertulis terutama berupa otobiografi, surat - surat pribadi, buku, surat kabar dan dokumen – dokumen pemerintah. Dokumen banyak digunakan sebagai sumber sejarah karena dalam dokumen memuat catatan tentang berbagai tindakan, pendapat, pikiran, dan pernyataan menjadi suatu kejadian. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kesaksian siapapun yang bukan merupakan saksi mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan seperti yang diungkapkan (Kartono,1980:190). Sumber Sekunder ini peneliti mendapatkan buku-buku tersebut di UPT Perpustakaan Universitas Jember, UPT Perpustakaan Daerah Jember, milik pribadi, dan Internet.

3. 2 Kritik

Setelah sumber-sumber terkumpul maka selanjutnya adalah melakukan langkah kedua yaitu Kritik sumber. Menurut Moh. Ali, definisi kritik adalah langkah menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak yang diperlukan dan mengandung informasi yang relevan untuk sejarah yang akan disusun (2005:114). Dari berbagai sumber data yang berhasil dikumpulkan tentu tidak semua dapat di terima begitu saja, akan tetapi masih memerlukan langkah pengujian dan pengecekan untuk mengetahui apakah sumber data tersebut asli atau mungkin informasi dari data-data tersebut meragukan (Hariyono, 1955:5). Kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik instern. Kegiatankritik ekstern ialah yang dilakukan dalam penelitian menyelidiki keaslian sumber dengan jalan melihat siapa yang mengarang buku yang oleh penliti dijadikan sumber primer, dan seberapa jauh keterlibatan pengarang buku dengan topik

kajian agar keterangan yang didapat dari sumber yang ada dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan kritik intern merupakan kegiatan untuk meneliti kebenaran isi (Kuntowijoyo, 2001:101). Peneliti melakukan kritik intern dengan melakukan penyelidikan terhadap substansi yaitu dengan cara memahami maksud dari pengarang. Kemudian peneliti melakukan perbandingan antara buku yang sama dengan buku yang lainnya. Peneliti melaksanakan kritik sumber dengan caramengumpulkan berbagai sumber yang terkait dengan masalah yang dikaji kemudian mengadakan kritik pada sumber yang sudah ditetapkan mengenai Otentitas dan Kredibilitas sumber, apakah sumber tersebut bisa menjadi fakta sejarah atau bukan.

3. 3 Interpretasi

Langkah ketiga dari metode sejarah adalah Interpretasi. Terdapat dua macam interpretasi yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu menguraikan data-data yang diperoleh, sedangkan sintesis yaitu menyatukan data-data tersebut sehingga ditemukan fakta. Fakta tersebut kemudian dirangkai dan dihubungkan antara satu dengan yang lain secara kronologis, sehingga menjadi kesatuan cerita yang sistematis, logis, rasional dan menjadi informasi yang mudah dimengerti.

Interpretasi maksudnya ialah merangkai dan menghubungkan atau mengaitkan fakta-fakta sejarah dengan berusaha seobjektif mungkin sehingga dapat mengungkapkan kehidupan masyarakat masa lampau beserta segala aktivitasnya secara faktual, rasional, kronologis dan logis. Dalam melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah mengenai dinamika GERWANI di kota Semarang tahun 1954-1965 dengan cara membandingkan dan menghubungkan fakta-fakta sejarah yang berhubungan dengan kajian peneliti, kemudian fakta-fakta tersebut dirangkai secara sistematis.

3. 4 Historiografi

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah langkah historiografi. Historiografi merupakan klimak dari penelitian sejarah dan merupakan bagian dari metode sejarah yaitu menulis hasil interpretasi atas fakta-fakta sejarah yang telah

disusun secara analitis, kronologis dan sistematis. Historiografi adalah langkah terakhir setelah melakukan tindakan heuristik, kritik, dan interpretasi. Penyajian dalam hasil penelitian ini adalah penyusunan kisah sejarah dengan bentuk skripsi deskriptif analitis analisis menggunakan sistematika bahasa Indonesia yang baku sesuai EYD (Ejaan Yang Disempurnakan).

Berdasarkan langkah-langkah diatas maka dapat tersusun lima bab. Bab 1 pendahuluan yang memaparkan latar belakang permasalahan, penegasan judul, ruang lingkup permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli yang berkaitan dengan dinamika GERWANI di kota Semarang tahun 1954-1965 akan dimuat dalam bab 2 tinjauan pustaka. Sedangkan tata cara memperoleh data, menganalisis data, dan merekonstruksi fakta-fakta sejarah dalam sebuah karya ilmiah yang menarik dan bertujuan membantu proses penelitian sejarah akan dimuat dalam bab 3 metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian sejarah di dalamnya terdapat empat tahap yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Bab 4 akan memaparkan Latar Belakang Berdirinya Organisasi Gerwani Di Kota Semarang, yang terdiri dari; 4.1 latar belakang geografis, 4.2 latar belakang sosial ekonomi dan budaya, 4.3 latar belakang politik. Bab 5 akan memaparkan Dinamika Gerwani Di Kota Semarang Di Dalam Bidang Sosial Dan Politik Pada Tahun 1954 Sampai Pada Tahun 1965, yang terdiri dari: 5.1 dinamika organisasi dan keanggotaan Gerwani, 5.2 dinamika progam kerja Gerwani. Bab 6 terdiri dari; sub bab kesimpulan dan saran.

BAB 4. LATAR BELAKANG BERDIRINYA ORGANISASI GERWANI DI KOTA SEMARANG

4.1 Latar Belakang Geografis

Kota Semarang pada tahun 1954 terletak di pesisir pantai utara pulau Jawa dengan posisi 110°23'57" BT dan 110°27'70" BT, serta 6°55'6" LS dan 6°58'18" LS. Dari laut Jawa membujur ke Selatan seluas 9.940 kilometer persegi dengan batasan wilayah di sebelah utara yaitu laut Jawa, sebelah timur adalah kabupaten Demak, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kendal dan sebelah selatan yaitu kabupaten Semarang (PEMDA Kotamadya Semarang, 1979:5). Letak kota Semarang yang demikian mempengaruhi perkembangan Gerwani di wilayah Kota Semarang maupun wilayah sekitarnya, karena penduduk Semarang merupakan letak yang strategis dimana kota ini dekat dengan pelabuhan dan juga dikenal sebagai kota dagang. Semenjak VOC membangun kawasan ini dan menjadikannya salah satu pusat perdagangan yang paling utama di Jawa. Dan juga kota ini sempat menjadi pusat aktivisme golongan Kiri dan Nasionalis semenjak awal 1920-an.

Semarang juga merupakan salah satu kota yang terletak di pantai utara Jawa Tengah dan termasuk dalam wilayah eks karesidenan Semarang. Kota Semarang sangat strategis letaknya, karena merupakan wilayah yang dilewati jalur lalu lintas utara Jawa, baik jalur kereta api maupun jalan raya, baik lalu lintas yang datang dari arah Jakarta, Semarang, Surabaya maupun sebaliknya. Gelar Venezia dari timur diberikan pada kota Semarang oleh orang-orang "tempoe doeloe" karena keindahan dan keunikan geologisnya yang jarang dimiliki oleh kota lain. Setelah kemerdekaan Indonesia Semarang menjadi ibukota provinsi Jawa Tengah, sehingga kabar tentang organisasi Gerwani mudah menyebar ke berbagai daerah.

Segi topografi, kota Semarang memiliki dua topologi, yaitu wilayah perbukitan (kota atas) dan lembah atau daratan (kota bawah) yang berbatasan langsung dengan laut. Kota bawah memiliki ketinggian diukur dari permukaan laut 0,75M. Daerah bawah meliputi daerah sepanjang garis pantai utara melebar

kearah pedalaman sampai di perbatasan daerah perbukitan. Semarang merupakan salah satu kota yang terletak di pantai utara Jawa Tengah dan termasuk dalam wilayah eks karesidenan Semarang. Dalam rancangannya kota Semarang menerapkan prinsip hirarki jalan seperti yang ada di Eropa, dimana pengembangan kota adalah dengan pembagian lingkungan yang tidak lagi berdasarkan suku, tetapi pada kelas ekonomi.

Pada periode tahun 1954 – 1965 wilayah kota Semarang terdiri dari lima kecamatan, yaitu kecamatan Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Selatan, dan Semarang Tengah. Batas-batas kecamatan dan desa, pada awalnya hanya berupa jalan-jalan kecil dan ada pula yang berupa tanah pekarangan. Batas-batas tersebut dulu ditetapkan oleh tuan-tuan tanah untuk pelaksanaan pemungutan sewa tanah. Ada desa yang mempunyai wilayah di tengah-tengah desa yang lain dan ini mengakibatkan sulitnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa. Dengan demikian wilayah kerja Gerwani pada waktu itu juga meliputi semua wilayah kecamatan yang ada di kota Semarang tersebut. Oleh sebab itu juga dengan kondisi geografis yang seperti itu Gerwani memulai persemaian awal organisasinya melalui daerah perbukitan dahulu karena dianggap masih pelosok sehingga lebih mudah untuk menyebarkan ideologinya yang kemudian menjalar ke daerah lembah atau daerah kota. Pemilihan kota atas sebagai persemaian awal juga didasari untuk memudahkan langkah Gerwani dalam melebarkan sayap karena di kota atas masyarakatnya lebih mudah direkrut, dan juga untuk mengawasi pertumbuhan kota bawah sehingga Gerwani bisa mengambil langkah yang tepat dalam memilih daerah-daerah mana di kota bawah yang bisa dimasuki ideologi terlebih dahulu.

4.2 Latar Belakang Sosial Ekonomi Dan Budaya

Kota Semarang pada tahun 1954 memiliki mayoritas penduduknya adalah pribumi suku Jawa, sedangkan yang lain adalah pendatang, yang terdiri dari orang luar Jawa, etnis Cina, dan sebagian keturunan Arab. Sampai pada akhir bulan April tahun 1954, jumlah penduduk dalam lingkungan kota Semarang ada 366.208 jiwa. Mata pencaharian orang-orang pribumi baik yang asli maupun

pendatang sebagai petani, nelayan, buruh pabrik, buruh bangunan, pegawai sipil, maupun ABRI. Untuk etnis Cina dan Arab sebagian besar sebagai pedagang dan pengusaha yang memiliki toko-toko, pabrik-pabrik, atau perusahaan-perusahaan. Jumlah angka kelahiran dan kematian selama periode ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, satu hal yang patut dicatat adalah angka kelahiran bayi kembar, dimana terdapat informasi dari pihak yang berkompeten, bahwa ada fenomena menarik dari kelahiran bayi kembar. Di kecamatan Semarang Timur misalnya, di salah satu kampung, diantara ibu yang melahirkan terdapat 75 persen yang melahirkan dengan bayi kembar.

Kota Semarang lebih mengarah pada kota perdagangan. Hal ini disebabkan lahan pertanian semakin menyempit dan kesuburannya berkurang. Dalam bidang pertanian kota Semarang tidak begitu menonjol, akibat perkembangan kota dan bertambahnya jumlah penduduk serta timbulnya wilayah industri, dengan sendirinya banyak areal pertanian yang digunakan untuk perumahan dan wilayah industri. Dari tahun ke tahun areal pertanian semakin menyempit, sehingga harus ada usaha-usaha lain di sektor pertanian untuk menyediakan bahan makanan bagi mereka yang pindah dan bekerja di sektor industri (Irawan, 1972:107).

Pemerintah Daerah Semarang dalam rangka menuju kota perdagangan, telah aktif membantu penyediaan tanah-tanah dan penyelesaian pemindahan hak tanah. Mereka yang bertani biasanya semata-mata hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri atau *Subsistance Farming*. Berkenaan dengan masalah ini Pemerintah Daerah berusaha membantu para petani. Misalnya dalam pengairan di samping swadaya dan gotong-royong masyarakat, pemerintah juga membantu lewat Anggaran Pembangunan Daerah (Soekanto, 1969:120).

Wilayah kota Semarang yang berdekatan dengan pantai tentunya terdapat juga penduduk yang hidup sebagai nelayan. Cara hidup dan tradisi mereka sebagian besar telah masuk perangkap dan di dominasi oleh pemilik modal. Ditambah lagi banyaknya nelayan dari luar daerah yang datang untuk mengadu nasib, walaupun mereka hanya tinggal sementara namun hal ini dapat mengakibatkan turunnya hasil penangkapan nelayan dari dalam. Sehubungan dengan masalah ini Pemerintah Daerah juga telah mengadakan bimbingan aktif

serta memberi fasilitas-fasilitas dalam rangka pemberantasan sistem ijon dan cengkeraman lintah darat. Dengan cara memberikan kredit sebagai biaya, berarti melengkapi alat-alat penangkapan ikan dalam rangka usaha meningkatkan produksi (Soenaryo, 1972:60).

Kota Semarang memiliki pelabuhan laut yang terletak pada posisi 7°,00 selatan dan 110°,25 timur, luas tanah yang diusahakan meliputi 398,1250 Ha. Pelabuhan tersebut untuk berlabuh kapal-kapal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di sekitar pelabuhan terdapat beberapa gudang untuk keperluan bongkar muat barang. Dalam kondisi yang demikian ini pelabuhan Semarang memegang peranan penting dalam hal bongkar muat dan keluar masuk barang-barang. Pekerjaan bongkar muat barang merupakan mata rantai kegiatan masyarakat pelabuhan. Barang-barang yang diekspor lewat pelabuhan tersebut terutama hasil dari daerah Propinsi Jawa Tengah berupa hasil pertanian, perkebunan, dan kerajinan rakyat. Untuk barang-barang yang diimpor terutama yang belum dapat diproduksi sendiri misalnya obat-obatan, tekstil, mesin, alat-alat elektronika, dan sebagainya (Soenaryo, 1972:101).

Perkembangan perekonomian di kota Semarang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian tingkat pusat. Sekitar tahun enampuluhan keadaan perekonomian semakin suram. Sistem ekonomi yang bersifat nasional demokratis yaitu dengan cara terpimpin, dalam pelaksanaannya lebih menonjolkan terpimpinnya daripada asas-asas demokrasi ekonomi. Pemerintah harus mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang setiap tahun semakin besar, akibat inflasi semakin meluas dan barang-barang harganya semakin membumbung tinggi menyebabkan rakyat kecil semakin menderita (Notosusanto, 1984:321). Pada masa tersebut struktur ekonomi bangsa Indonesia hampir runtuh. Inflasi yang semakin meluas dan harga barang-barang naik sekitar 500 persen, sedangkan harga beras sedang naik sekitar 900 persen (Rickles, 1991:426).

Kota Semarang yang berperan sebagai kota perdagangan, ditambah dengan pesatnya jumlah penduduk menumbuhkan pusat-pusat perbelanjaan, pasar-pasar, dan toko toko yang mutlak dibutuhkan. Pasar merupakan tempat jual

beli barang, kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembelian yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa, yang di pakai dalam pergaulan sehari-hari (Dahlan, 2001:568).

Kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Semarang dalam masalah ini diarahkan pada penyediaan pusat-pusat atau tempat-tempat perbelanjaan yang menyebar lokasinya, melalui cara pembangunan berdikari. Maksud dari pembangunan berdikari bahwa biaya pembangunan dibebankan kepada calon pemakai, dengan hak pakai selama jangka waktu sekitar 20 tahun. Selebihnya para pemakai diberi hak sewa. Pemerintah hanya terbatas pada penyediaan tanah atau tempat serta memberi fasilitas-fasilitas dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan tersebut (Soenaryo, 1972:45). Adapun pasar-pasar di Kotamadya Semarang yaitu Pasar Johar, Pasar Bulu, Pasar Karangayu, pasar Peterongan, dan Pasar Dargo.

Tabel 4. 2. 1. Jenis dan Tempat Pasar Tradisional di Kota Semarang

No.	Jenis Pasar	Tempat
1	Pasar alat-alat bangunan ringan	Pasar Mambo di Jl. Kokroso
2	Pasar Beras	Pasar Dargo
3	Pasar hewan atau kambing	Mrican
4	Pasar ikan laut	Pontjol
5	Pasar penjualan tekstil	Gang Warung
6	Pasar penjualan onderdil kendaraan bermotor	Jl. Mataram
7	Pasar penjualan alat-alat bekas dan onderdil-onderdil bekas sepeda	Tawang
8	Pusat perbelanjaan serba ada siang dan malam	Pasar Johar dan peterongan
9	Pasar pusat perbelanjaan emas	Kranggan dan gang Pinggir
10	Pasar serba ada waktu malam	Pasar Yaik
11	Pasar unggas	Sendowo dan Jl. Kartini

Sumber: (Soenaryo, 1972:7)

Kota Semarang lebih mengarah pada kota perdagangan, hal ini karna tempat perbelanjaan yang sekian banyak sehingga masyarakat semarang lebih memilih berdagang daripada bertani. Selain itu, disebabkan lahan pertanian semakin menyempit dan kesuburannya berkurang. Dalam rangka menuju kota perdagangan, Pemerintah Daerah Semarang telah aktif membantu penyediaan tanah-tanah dan penyelesaian pemindahan hak tanah. Disamping itu pemerintah telah berusaha memelihara iklim yang baik serta aman bagi pendirian dan pertumbuhan industri baik fisik maupun politis. Bagi industri kecil dan home industri, Pemerintah Daerah telah membina dengan kegiatan-kegiatan bimbingan teknik dari Dinas Perindustrian (Soenaryo, 1972:50). Oleh sebab itu Gerwani memilih daerah perbukitan dahulu sebagai titik awal penyebaran ideologinya, di tambah lagi penataan kota semarang berdasarkan pada kelas ekonomi sehingga Gerwani memulai persemaiannya dimulai dari masyarakat atau lingkungan yang miskin.

Kota bawah waktu itu merupakan tempat yang sangat ramai dan cepat pertumbuhan sosialnya sehingga menjadikan ideologi Gerwani ini mudah sampai ketelinga masyarakat umum, sehingga Gerwani mampu tumbuh dan berkembang dengan cepat. Apalagi ditambah dengan Semarang sebagai kota perdagangan yang menambah cepat laju penyebaran mengenai aktivitas Gerwani.

Mengenai perkembangan sosial budaya kota Semarang, terutama agama Islam, umumnya berkembang dengan baik. Pusat peradaban Islam di kota Semarang terdapat pada pemukiman keturunan Arab di wilayah kelurahan Banjarsari dan sekitarnya, yang secara keseluruhan termasuk kecamatan Semarang Barat. Kelurahan Banjarsari dibatasi oleh kelurahan Melayu Darat di sebelah utara, jalan Layur dan sungai Semarang di sebelah timur, jalan Petek di sebelah barat, dan jalan Imam Bonjol di sebelah selatan (Badan Perencanaan Daerah Tingkat II Semarang, 1976:17). Kedatangan agama Islam khususnya di Jawa tidak membawa akibat perubahan politik dan budaya yang menyolok. Hal ini karena pada waktu itu kepercayaan Hindu dan Budha sudah mengakar, sehingga dalam perkembangannya agama Islam ada yang disebut santri dan Islam kejawen. Penganut agama Islam santri pada dasarnya taat menjalankan ajaran

Islam. Adapun golongan Islam kejawen, walaupun tidak menjalankan Shalat, puasa, serta tidak bercita-cita naik haji, tetapi mereka percaya ajaran keimanan agama Islam.

Kedatangan bangsa asing ke Indonesia sejak jaman dahulu juga membawa pengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Mereka datang baik karena alasan perdagangan, politik, kunjungan, dan sebagainya. Salah satu unsur kebudayaan mereka adalah sistem religi baik Hinduisme, Budhisme, Islamisme, maupun Nasrani. Sebelum bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia khususnya di Jawa, sistem religi orang Jawa adalah Sinkritisme. Dalam perkembangannya sistem religi asli masih tetap dan tidak ditinggalkan bahkan orang Jawa memproses sistem religinya manunggal dengan sistem religi bangsa asing.

Akibat banyaknya pengaruh dari luar terutama masalah kebudayaan, masyarakat Semarang dalam hal ini pemuda dan pemudinya diharapkan oleh pemerintah agar mempunyai rasa tanggung jawab dan cinta kepada tanah air dan bangsa. Pemerintah telah berusaha mengadakan penanggulangan dan pencegahan terhadap merosotnya bidang kesenian dan kebudayaan yaitu dengan usaha pembinaan dan pengembangan melalui kelompok-kelompok kesenian dan kebudayaan. Di Semarang terdapat kelompok-kelompok kesenian antara lain Karawitan, Tari Jawa, Wayang Orang, Ketoprak, orkes Keroncong, Band, Gambus, Orkes Melayu, Samroh, Drama atau Sastra, Dalang, Waranggono, Biduan Keroncong, dan lain-lain (Soekirno, 100:1956). Untuk tempat-tempat atau gedung-gedung yang digunakan untuk acara pertunjukan dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4. 2. 2. Macam-macam Gedung Kesenian

No.	Nama Gedung	Alamat
1.	Gedung Kesenian Ngesti Pandawa	Jl. Pemuda
2.	GRIS	Jl. Pemuda
3.	Wisma Candra Wulan	Jl. Beringin
4.	Sasana Suka	Jl. Pemuda
5.	Gedung Tri Dharma	Jl. Mataram
6.	Sri Wanita	Jl. Dr. Cipto
7.	Panggung Terbuka THR	Jl. Tegal Wareng
8.	Balai Polisi	Jl. Pemuda
9.	Panti Mandala	Jl. Atmodirono
10.	Wismas Manggala	Jl. Gajah Mada
11.	Bar Dibya Puri	Jl. Pemuda
12.	Shinta Room Sarinah	Jl. Pemuda
13.	Aula Kodim 0733	Jl. Pemuda
14.	Aula Perhutani	Jl. Gajah Mada

Sumber: (Soekirno, 1956:101)

Tempat-tempat tersebut sering digunakan untuk acara pementasan berbagai acara kesenian yang ada di Semarang, dengan tujuan untuk memperkenalkan kesenian tradisional yang cocok dengan selera masyarakat. Para anggota Gerwani juga ikut ambil bagian dalam upaya mempertahankan budaya tanah air, momen tersebut juga mereka gunakan untuk melakukan promosi terhadap ideologi Gerwani sekaligus menarik para pemuda untuk ikut dalam organisasi. Masyarakat Semarang yang datang diharapkan mendapat hiburan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Disamping itu juga sebagai sarana rekreasi, pendidikan, dan sekaligus sebagai sarana memupuk cinta kepada kebudayaan sendiri.

Pada masa Demokrasi dipimpin segala sesuatu yang menyangkut masalah kenegaraan telah diatur oleh pemerintah baik masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menyangkut kreasi seni dan selera hiburan (Kartodirjo,

1977:104). Sementara itu PKI melalui organisasi-organisasi massanya yang berada di bawah naungannya selalu meningkatkan pertentangan dalam masyarakat. Mereka mencari kesempatan terhadap kondisi budaya yang ada dengan memperkeruh suasana. Aksi-aksi mereka dengan cara mengkampanyekan anti terhadap segala unsur kebudayaan yang datang dari barat. Misalnya adanya kesenangan anak-anak muda terhadap musik barat khususnya gaya musik The Beatles dilarang. Demikian juga terhadap kelompok Band Bersaudara seperti Koes Bersaudara yang akhirnya berganti nama menjadi Koes Plus yang pernah ditahan gara-gara kelompok band tersebut menyanyikan lagu-lagu yang berorientasi kebarat. Mereka juga dituduh telah ikut menyebarkan budaya Nekolin.

PKI mendirikan organisasi yaitu “Lekra” atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950 untuk meningkatkan kampanye anti budaya barat. Melalui Lekra ini sasarannya dengan menyusupkan atau menginfiltrasikan mental Komunis ke dalam jiwa bangsa Indonesia. Sebagai contoh dari kreasi seniman-seniman Komunis yang tergabung dalam Lekra, setiap orang yang membaca dan mendengar bahwa keasi mereka itu menimbulkan rasa benci yang ditujukan kepada alat-alat negara dan revolusi. Ada akhirnya pemilu tahun 1955 menunjukkan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) di wilayah kota Semarang memperoleh kemenangan mutlak dan berakibat pada kuatnya kedudukan Partai Komunis Indonesia pada parlemen daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kota Semarang). Setelah pemilihan umum, Gerwani sebagai salah satu organisasi berbasis massa yang mempunyai hubungan erat dengan PKI mengalami perkembangan yang signifikan (Wierenga, 1999:345).

Gerwani di kota Semarang bersama golongan Lekra mengadakan operasi “Gempa Langit III”. Markas dari operasi ini di sebuah gang sempit di sebelah pasar Johar Semarang. Operasi ini dipimpin oleh Martian, seorang pelukis. Daerah yang menjadi sasaran operasi ini adalah wilayah Tambaklorok dan gang-gang kumuh di kota Semarang. Operasi Gempa Langit II merupakan bentuk turba (turun ke bawah) para seniman bersama rakyat. Realitas sosial di masyarakat akan menjadi ilham dari karya mereka. Hasil akhir dari gerakan turba ini kemudian

dipamerkan di Semarang dan dibuka oleh Kepala Daerah kota Semarang pada 14 Juni 1959. Para perupa yang turut dalam pameran ini antara lain Batara Lubis, Fadjar Sidik, Martian, Djuli Sutrisno, Tarmizi (Yuliantri, 2008:316-317) Budaya kawin muda di Semarang terlihat pada masyarakat perbukitan karena masyarakat perbukitan masih hidup dalam lingkungan adat yang kolot (kuno atau tidak modern), rata-rata usia menikah mereka yaitu pada usia dibawah 18 tahun dan menurut tradisi usia tersebut di anggap sudah dewasa dan mampu untuk membentuk sebuah keluarga. Seperti yang diungkapkan Sunitri sebagai berikut:

“Pada zaman itu, orang tua yang mempunyai anak gadis dibawah umur 18 tahun akan sesegera di carikan jodoh untuk anaknya. Masyarakat di sini menganggap kalau perempuan tidak segera dikawinkan maka mereka menganggap perempuan tidak laku. Sehingga masyarakat disini mengawinkan anaknya pada usia muda. Mereka tidak peduli apakah anak mereka lulus atau tidak lulus Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat mereka di nikahkan, terutama ayahnya yang sangat menginginkan anaknya untuk cepat menikah, karena nantinya akan ada anggapan miring tentang hal tersebut. Namun, jika anak gadis menolak untuk dikawinkan maka ayahnya akan melakukan hal apapun terhadap anaknya untuk memaksanya menikah, termasuk memukuli dan menyiksa anaknya sampai anak gadisnya mau menikah dengan lelaki pilihan ayahnya. Rata-rata lelaki yang akan mereka nikahpun selisih umurnya hampir setengah dari usia mereka sendiri. Saat itu saya menikah usia saya menginjak 14 tahun, jadi ya memang seperti itu budayanya jadi saya manut saja dengan orang tua” (Wawancara dengan Sunitri, 02 September 2014)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa, perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan harus mendapatkan perlindungan dari kaum laki-laki. Sehingga dengan usia 12-17 tahun perempuan harus sudah menikah. Perempuan usia 12-17 tahun yang belum menikah akan menjadi bahan gunjingan warga masyarakat, karena dianggap perempuan yang tidak laku. Oleh sebab itu, perempuan desa cenderung menikah pada usia muda.

Pada hakekatnya posisi perempuan dalam kehidupan pedesaan dianggap sebagai elemen yang tidak terlihat perannya di masyarakat, karena perempuan hanya memperoleh tempat di dalam keluarga. Dalam hal ini perempuan sebagai ibu rumah tangga mempunyai tugas untuk patuh pada suami dan merawat anak di

rumah, sedangkan anak perempuan biasanya dipingit dan dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya, anak perempuan tidak berdaya untuk menolak. Orang tua mencarikan jodoh untuk anak perempuannya juga tidak sembarangan. Hal ini seperti yang dialami oleh Surti. Surti menikah pada usia menginjak 13 tahun. Surti dinikahkan oleh ayahnya karena calon suaminya adalah mandor perkebunan, sehingga orang tua Surti langsung menjodohkan. Seperti yang diungkapkan Surti sebagai berikut:

”Pada usia 14 tahun saya sudah dinikahkan oleh orang tua saya, pada hal waktu itu saya belum ingin menikah dan masih ingin bersekolah, tetapi karena orang tua saya sedikit memaksa karena calon suami saya adalah guru dan menilai saya sudah waktunya menikah sehingga saya pun mau untuk dinikahkan. Selama 1 minggu saya tidak diijinkan untuk bepergian keluar rumah” (Wawancara dengan Surti, 05 September 2014)

Berdasarkan penuturan di atas dapat dijelaskan bahwa, perempuan saat itu tidak mempunyai hak penuh untuk menentukan keinginannya, misalnya untuk bersekolah atau untuk beraktifitas di luar rumah. Orang tua mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak perempuan untuk mencarikan jodoh yang dianggap baik dan cocok untuk anaknya. Orang tua juga tidak pernah melihat berapa usia anaknya yang terpenting melihat anak sudah kelihatan dewasa dan dapat membantu ibu di dapur berarti siap untuk dinikahkan. Hal ini kemudian oleh Gerwani disikapi dengan memberikan pendidikan dan pengajaran bahwa wanita juga punya hak yang sama dengan laki-laki, dan juga ini yang mendorong Gerwani selaku organisasi yang membela hak anak-anak dan wanita lebih keras dalam perjuangannya.

Pimpinan pusat Gerwani kemudian mencurahkan tenaganya lebih besar kepada masalah pendidikan aktivis organisasi. Selanjutnya Gerwani makin teguh mengambil posisi yang hakikatnya humanistik, yang dirumuskannya secara sosialis konstruktivis, yaitu bahwa kita semua manusia, sebagai buruh dan tani, mempunyai masalah sosial politik yang sama. Gerwani juga semakin teguh mengambil pendirian yang hakikatnya keperempuanan, yaitu bahwa kita semua adalah ibu dan istri. Dengan demikian terkait dengan soal-soal susila, anak, dan pangan. Pada kedua pendirian itulah, antara pimpinan pusat dan kader daerah

dapat berbeda dalam menentukan prioritas. Gerwani memandang kombinasi antara dua pendirian itu sebagai keunggulannya terhadap ideologi organisasi perempuan lainnya.

Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai juga menjadi sebab rendahnya tingkat pendidikan, meski Pemerintah Daerah Semarang telah menaruh perhatian terhadap pendidikan Taman Kanak-kanak (Soenaryo, 101-109:1972). Kurangnya jumlah bangunan sekolah dan letak sekolah yang terlalu jauh menyebabkan masyarakat enggan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Di samping itu biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Oleh sebab itu, Gerwani mampu diterima di dalam masyarakat Semarang karena Gerwani mempunyai tujuan untuk menjunjung hak perempuan dan memajukan pendidikan melalui program-program yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

4.3 Latar Belakang Politik

Kongres Perempuan Indonesia pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928 di pendopo Joyodipuran, Yogyakarta, dan dipimpin oleh Ny. R.A Sukonto. Kongres ini merupakan lembaran sejarah baru bagi gerakan wanita Indonesia, dimana organisasi wanita menggalang kerjasama untuk kemajuan wanita khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ciri utama kesatuan pergerakan wanita Indonesia pada masa ini ialah berazaskan kebangsaan dan menjadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan diantaranya ialah kedudukan wanita dalam perkawinan, poligami dan koedukasi. Kongres ini dihadiri oleh tiga puluh organisasi wanita (Kowani, 1978:33).

Kongres Perempuan Indonesia berikutnya diadakan di Jakarta (1935), Bandung (1938), dan Semarang (1941), dimana perjuangan nasional berangsur-angsur semakin menonjol. Dalam kongres 1935 terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (KPI), dan dengan demikian PPII dibubarkan. Perhatian tertentu ditujukan kepada kaum wanita dan golongan miskin, tetapi keanggotaan masih berasal dari lapisan atas, dan tuntutan yang disuarakan pun sebagian besar masih diarahkan pada kepentingan kaum wanita golongan atas. Pada saat pelaksanaan

KPI III di Bandung pada tanggal 23-27 Juli 1938, diantaranya berhasil diputuskan bahwa tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu bagi bangsa Indonesia (Kowani, 1978:45-55). Semenjak 1930 gerakan nasional berkembang pesat, dan terlihat pula tanda-tanda tumbuhnya nasionalisme di dalam gerakan wanita, namun sampai awal pendudukan Jepang tahun 1942, selain kaum wanita Serikat Rakyat, Isteri Sedar adalah satu-satunya organisasi yang secara terbuka dan sistematis mengancam politik pemerintah kolonial Belanda, dan memberi perhatian pada perjuangan anti-kapitalisme. Misalnya, pada kongresnya tahun 1932, dimana Sukarno yang di kemudian hari menjadi presiden mengucapkan pidatonya yang berjudul “Gerakan Politik dan Emansipasi Wanita,” Isteri Sedar menyatakan bahwa wanita Indonesia harus memainkan peranan aktif di bidang politik. Hal itu didasarkan pemikiran, bahwa “hanya Indonesia yang merdeka oleh usaha besar-besaran kaum laki-laki dan wanita yang bersatu padu yang akan sanggup memberikan persamaan hak dan tindakan kepada rakyat Indonesia”. Selain itu Isteri Sedar juga menyatakan bahwa nasib kaum wanita proletar harus diperbaiki. Istri Sedar juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia di mana penghargaan dan kedudukan wanita dan laki-laki sama dan sejajar. Organisasi ini juga bersikap kritis terhadap norma-norma adat, tradisi dan agama yang pada prakteknya merugikan kaum wanita. Istri Sedar bersikap anti dan selalu dengan pedas menyerang imperialisme dan kolonialisme (Pringdodigdo, 1967:167).

Pada bulan Juni 1932 beberapa organisasi yang tidak berazaskan agama bergabung menjadi satu dengan nama Istri Indonesia (II) yang memperjuangkan Indonesia merdeka dengan dasar demokrasi. Organisasi baru ini giat berusaha agar wanita bisa duduk dalam dewan-dewan kota, selain juga memperhatikan masalah perkawinan dan perceraian yang pada waktu itu pengaturannya banyak merugikan kaum wanita (Rochwulaningsih, 1996:43). Selain organisasi-organisasi, mulai bermunculan juga organisasi yang anggotanya terdiri atas para wanita yang bekerja di luar rumah. Demikianlah untuk pertama kali dibentuk di Jakarta pada tahun 1940 “Perkumpulan Pekerja Perempuan Indonesia” yang beranggotakan para wanita yang bekerja di kantor baik pemerintah ataupun swasta sebagai guru, perawat, pegawai kantor, dan sebagainya. Namun, dilihat dari

kegiatannya, organisasi organisasi tersebut belum dapat dikatakan sebagai organisasi profesi, karena pada umumnya kegiatan mereka ditekankan pada pendidikan ketrampilan kewanitaan dan pemupukan kesadaran kebangsaan, tidak beda dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi wanita lainnya (Wierenga, 1999:141).

Tahun 1939 Dalam rangka menyelesaikan masalah reformasi perkawinan yang pelik itu pada saat itu dibentuk sebuah badan yang bertugas meneliti hak-hak wanita dalam perkawinan, baik menurut adat, hukum Islam (fiqih), maupun hukum Eropa. Namun sebelum badan ini berhasil membuahkan sesuatu dalam rangka pembuatan kompromi antara golongan Islam dan bukan Islam, pada 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang. Semasa pendudukan Jepang semua organisasi wanita Indonesia dilarang. Penguasa baru mendirikan organisasi umum yang bernama Tiga A pada bulan April 1942, dengan bagian wanita yang sudah menikah bernama Gerakan Istri Tiga A, sedangkan bagian wanita yang belum menikah disebut Barisan Putri Asia Raya. Gerakan Tiga A tidak berumur panjang, karena pada bulan Maret 1943 digantikan oleh organisasi "PUTERA" (Pusat Tenaga Rakyat) yang bagian wanitanya Barisan Pekerja Perempuan Putera (Suwondo, 1984:204). Satu-satunya organisasi wanita di bawah kekuasaan Jepang yang diizinkan hidup, yaitu Fujinkai yang dibentuk di daerah-daerah dengan ketuanya istri masing-masing kepala daerah. Kegiatan organisasi ini adalah di bidang pemberantasan buta huruf dan berbagai pekerjaan sosial. Mereka yang giat di dalam Fujinkai ini terutama adalah para istri pegawai negeri.

Seperti halnya organisasi-organisasi wanita sekarang, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi, Fujinkai melakukan kegiatan dalam hirarki yang sejalan dengan hirarki suami. Di kalangan kaum wanita, para anggota Fujinkai harus mempropagandakan cita-cita Jepang tentang "Asia Raya" di bawah pimpinan Dai Nippon. Fujinkai adalah salah satu di antara organ-organ yang digunakan Jepang untuk mengerahkan rakyat Indonesia bekerja "suka-rela" demi kemenangan "perang suci" mereka. Tanggal 1 maret 1944 organisasi pusat tenaga rakyat dilebur dalam organisasi baru yaitu Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa), maka dibentuk departemen wanita dari Jawa Hokokai yang disebut Jawa

Hokokai Fujinkai. Fujinkai-fujinkai yang telah ada di daerah-daerah menjadi bagian wanita dari Jawa Hokokai daerah. Pengurus pusat dari Jawa Hokokai Fujinkai yang merupakan pusat tata usaha di ketuai oleh Ny. Sunarjo Mangunpuspito dan wakil ketuanya yaitu Ny. Jos Wiriutama. Hubungan politik antara wanita dan laki-laki menjadi berubah secara mendasar semenjak Indonesia telah merdeka. Hal itu antara lain karena tidak adanya lagi musuh bersama, sehingga laki-laki cenderung mengklaim bidang politik sebagai bidang mereka sendiri, dan wanita lebih diposisikan untuk berperan di bidang sosial (Wierenga, 1999:222-223). Namun, pada masa kemerdekaan tujuan gerakan perempuan adalah untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan, memperjuangkan kesamaan politik, hak untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan bekerja. Diskriminasi terhadap perempuan tidaklah berkurang meskipun secara legal telah ada jaminan hak politik perempuan, yaitu pada pasal 27 UUD 45 dan UU 80/1958 tentang persamaan upah pekerja laki-laki dan perempuan. Pada masa ini, organisasi perempuan yang terbentuk harus bernaung dibawah partai politik (Murniati, 2004:19)

Pada tanggal 24-28 Nopember 1950 dalam kongresnya yang ke-5, KOWANI kemudian dibubarkan dan diganti dengan nama tanpa singkatan yaitu Kongres Wanita Indonesia (Primantiari, 1998:36). Dalam perjalanan selanjutnya, Kongres Wanita Indonesia hanyalah sebagai alat administrasi birokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan pemerintah daripada kepentingan wanita sendiri sebagai pelaku sejarah. Sementara itu, hampir bersamaan dengan pembentukan KOWANI, pada 4 Juni 1950 para wakil enam organisasi wanita berkumpul di Semarang, untuk melebur enam organisasi mereka masing-masing ke dalam satu wadah tunggal yang diberi nama Gerwis, yaitu kependekan dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar.

Enam organisasi tersebut ialah Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan (Kowani, 1978:105-106). Dalam kongres Gerwis yang pertama setahun kemudian diputuskan untuk

mengubah nama organisasi menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), tapi baru pada 1954 nama ini dipakai secara resmi. Seperti penuturan Sunitri berikut:

“Saya adalah salah seorang anggota muda yang ikut dikirim dari Semarang ke kongres 1951 di Surabaya. Selama kongres tampak jelas bahwa mereka yang menghendaki Gerwis benar-benar tetap Independen disingkirkan. Akhirnya Trimurti dikalahkan dalam pemungutan suara dan suwarti menjadi ketua. Terjadi banyak diskusi mengenai hal tersebut, terutama dikalangan para pemimpin. Anggota biasa umumnya hanya mengikuti garis pimpinan kelompok atau daerah masing-masing. Banyak anggota berteriak-teriak menghendaki Gerwis tetap mempertahankan jatidirinya. Saya juga ikut marah, tetapi tidak berdaya, akhirnya saya meninggalkan kongres. Dalam kongres diambil keputusan untuk mengubah nama Gerwis menjadi Gerwani, tetapi karena adanya perlawanan, maka diadakan kompromi. Untuk sementara nama Gerwis tetap dipertahankan, perubahan hanya akan berlaku dalam kongres berikutnya pada 1954” (Wawancara dengan Sunitri, 02 September 2014)

Organisasi-organisasi wanita tersebut memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda, tapi semuanya bersama-sama terjun di tengah pergerakan nasional. Diantaranya S.K. Trimurti Menteri Perburuhan Republik Indonesia pertama. Beliau anggota Partindo yang giat dalam Wanita Partindo, dan juga anggota Gerindo. Kemudian Salawati Daud, Walikota Makasar (sekarang Ujung Pandang). Di antara mereka banyak wanita muda, seperti Sudjinah dan Sulami, sebelumnya sudah giat di dalam PPI (Pemuda Puteri Indonesia), organisasi pemuda semasa perjuangan kemerdekaan yang berjiwa sosialis. Para anggota pendiri lainnya termasuk Tri Metty, Sri Panggihan (anggota PKI terkemuka dari Madiun), Sri Kusnapsiyah, Umi Sarjono (pendiri Gerwindo), dan Suharti (ketua departemen wanita CC PKI, ketua cabang Yogyakarta), dan lain-lainnya.

Sesuai dengan semangat revolusioner di masa itu, Gerwani aktif memerjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan di wilayah politik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan bangsa yang baru merdeka, seperti menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan bagi perempuan, pemberantasan buta huruf, dan mendirikan taman kanak-kanak sampai ke daerah pedesaan. Sebagai anggota federasi organisasi-organisasi perempuan di tingkat nasional, yaitu Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Gerwani bekerja sama dengan

organisasi-organisasi perempuan lain yang berlatar belakang politik berbeda untuk mereformasi Undang-undang Perkawinan yang mensahkan poligami, memprotes kenaikan harga-harga barang, dan terlibat dalam dewan sensor film. Demikian juga dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di tingkat daerah, misalnya di Yogyakarta, Gerwani terlibat dalam program pemberantasan pelacuran, penanganan anak-anak terlantar, dan pemberian bantuan untuk bencana banjir. Dalam menghadapi pemilihan umum 1955 berbagai partai politik membentuk bagian wanita masing-masing.

Perbedaan antara golongan massa wanita Islam dan nasionalis pun timbul. Berkembanglah bermacam-macam kegiatan seperti balai-balai wanita, bank-bank wanita, bahkan surau wanita didirikan. Bermunculan berbagai macam organisasi dan majalah wanita, tetapi hampir semua kegiatan ini semakin terikat pada partai politik (laki-laki), gerakan keagamaan (laki-laki), ataupun pada organisasi pejabat laki-laki. Pada sebagian besar organisasi ini pandangan elit pun tetap bertahan, walaupun pendudukan Jepang dan perjuangan pembebasan nasional telah agak menyamarkan tajamnya garis pemisah antara golongan kaya dan miskin dalam masyarakat Indonesia.

Ketua Gerwis yang pertama adalah Tri Metty. Sebelumnya beliau adalah Ketua Rukun Putri Indonesia yang berpolitik mandiri, dan juga anggota Laskar Wanita Jawa Tengah (Diniah, 2007:91). S.K. Trimurty dari Jogjakarta sebagai wakil ketua dan Srie Kustijah dari Semarang sebagai penulis. Dalam rapatnya yang pertama, Gerwis telah mengajukan tuntutan kepada pemerintah, antara lain minta supaya “fonds” yaitu pembangunan negara ditujukan bagi kemakmuran rakyat dan menghendaki negara kesatuan yang 100 persen lepas dari “isme” penjajahan.

Kedudukan Tri Metty tersisihkan dalam konferensi di Yogya, untuk mempersiapkan kongres I Gerwis, dan digantikan oleh S.K. Trimurti. Dalam periode ini Umi Sarjono, Suharti, dan Mudigdio, ibu mertua D.N. Aidit, sudah menjadi anggota atau mempunyai ikatan erat dengan PKI. Hal ini merupakan petunjuk jelas, bahwa kaum Komunis mempunyai suara penting dalam pendirian Gerwis. Meskipun Gerwis selalu menegaskan sebagai non-politik dan tidak

mempunyai kaitan dengan parpol mana pun, seperti dinyatakan dalam anggaran dasarnya, namun pengaruh PKI tampak tertanam sangat mendalam pada organisasi tersebut.

Keinginan Komunis untuk membangun organisasi wanita yang bisa dipimpinya, tentu saja bukan merupakan satu-satunya faktor bagi berdirinya Gerwis. Para pendiri Gerwis itu sendiri mempunyai hasrat bersama yang sungguh-sungguh, baik demi perjuangan kemerdekaan nasional maupun mengakhiri berbagai politik feodalisme. Hampir semua sejarah hidup para tokoh dan anggota Gerwani bercerita tentang kawin paksa, perceraian sepihak, larangan bersekolah, atau penghinaan-penghinaan lain yang terasa sangat menusuk hati mereka, maka mungkin sekali hal-hal tersebut itulah yang berperan sangat besar dalam meradikalkan para wanita tersebut. Beberapa dari mereka tertarik kepada PKI, karena hanya partai inilah yang dilihat bersungguh-sungguh melawan berbagai praktik demikian.

Kota Semarang dipilih sebagai basis Gerwis, karena secara historis merupakan “Kota Merah”. Di kota inilah lahirnya PKI. Pemimpin Gerwis yang sangat terkemuka, Ibu Munasiah, yang berbicara dengan garangnya dalam Kongres PKI 1924 dan dibuang ke Digul, berasal dari kota ini. Dialah yang mengorganisasi “Aksi Caping Keropak”, yang terkenal semasa perjuangan kemerdekaan itu. Ketika organisasi yang masih muda ini sedang sibuk membenahi dirinya, dan membangun cabang-cabangnya di seluruh Jawa dan di luar Jawa, memperketat pengawasannya terhadap “keresahan sosial”, pada Agustus 1951 terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh Gerwis, termasuk ibu Mudigdio dan Ibu Trimurti. Keduanya diperiksa selama satu minggu dan oleh karena itu para anggota Gerwis giat dalam panitia “Pembelaan Korban Razzia Agustus” (Wierenga, 1999:283-289).

Kongres Gerwis pertama kali diselenggarakan pada tanggal 17-22 Desember 1951 di Surabaya. Pada waktu itu keadaan sangat sulit, banyak utusan yang harus menghadiri kongres masih ada di penjara. Jika dilihat dari nama Gerwis, Gerakan Wanita Indonesia Sedar berarti bahwa anggota organisasi ini bersifat terbatas. Hanya kaum wanita yang telah sadar yang akan diterima sebagai

anggota, sedangkan jutaan massa wanita masih belum sadar akan arti politik. Mereka seharusnya ditarik untuk masuk ke dalam organisasi ini agar bisa terlibat dalam perjuangan. Oleh karena itu, Gerwis dikecam oleh anggota PKI. Sejalan dengan sejumlah perubahan yang terjadi pada PKI, dengan terpilihnya D.N. Aidit sebagai pimpinan baru (Januari 1951), terjadi tekanan di dalam Gerwis agar menghentikan agitasi perlawanannya terhadap pemerintah dan sebaliknya agar membangun “front dari bawah” (Diniah, 2007:91-93).

Kongres I menghasilkan keputusan yang sangat penting bagi organisasi ialah mengecilkan sayap feminis di dalam organisasi dan berusaha mengkonsolidasi pengaruh PKI terhadap pimpinan organisasi. Akan tetapi Suharti, salah satu calon dari PKI, dipandang terlalu “komunis” oleh mayoritas kongres, hingga PKI di satu pihak terpaksa harus menarik pencalonannya, di lain pihak menghalangi kepemimpinan S.K. Trimurti. Semasa perjuangan kemerdekaan S.K. Trimurti telah melatih banyak tokoh Gerwis, melalui berbagai kursus kader yang diselenggarakannya selaku Ketua Barisan Buruh Wanita. Umi Sarjono menang dalam pemilihan untuk kedudukan pertama, Trimurti di tempat ke dua, dan Suwarti tempat ke tiga. Karena Trimurti tidak bisa diterima PKI, Umi Sarjono mengundurkan diri, dan memberikan kursinya kepada Suwarti. Mereka berdua, Trimurti dan Umi Sarjono, lalu menjadi wakil-wakil ketua. Pada tahun 1957 Trimurti mengundurkan diri dari kepemimpinan, dan pada tahun 1965 dari keanggotaan.

Mencermati sejarah Gerwis dapat diketahui, bahwa pada tahun 1952 pernah bergabung Isteri Buruh Kereta Api, berikut dengan 10 cabang-cabang serta 4000 anggotanya. Kemudian pada tahun 1953 masuk pula yang terakhir organisasi Perwin, persatuan Wanita Indonesia dari Manado. Organisasi ini sudah tampil di depan dalam perang kemerdekaan. Mereka aktif melawan upaya Belanda untuk kembali menguasai bagian mana pun dari Indonesia, dan menentang KMB yang dalam pandangan mereka akan mendorong kembalinya modal asing ke Indonesia. Antara Kongres I dan Kongres II, Gerwis aktif dalam tiga front, yaitu politik, feminisme, dan sosial ekonomi. Pada front politik, melawan “unsur-unsur reaksioner”, terhadap gerakan untuk kemajuan wanita.

Pada front feminisme, melawan PP 19 (mengenai pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim-piatu pegawai negeri sipil) dan menyokong perjuangan umum untuk undang-undang perkawinan yang demokratis, dengan sependai mungkin menghindari konfrontasi dengan Sukarno. Front sosial ekonomi lebih ditekankan pada level grassroot dimana anggota Gerwis aktif dalam gerakan tani melawan usaha pemerintah mengusir mereka dari bekas tanah perkebunan yang telah mereka garap.

Gerwis aktif menempuh politik anti imperialisme sejak awal sejarahnya. Menurut Gerwis, pemerintah yang dikangkangi PNI, Masyumi, dan PSI, dengan membiarkan kembalinya para pemilik perkebunan asing, menjadi terlalu bersikap lunak terhadap modal asing dan imperialisme. Oleh karena itu, kaum wanita sebagai ibu rumah tangga menjadi sangat menderita. Sejak awal mula Gerwis merupakan organisasi wanita yang paling aktif di bidang politik nasional.

Gerwis mengeluarkan pernyataan menentang unsur-unsur reaksioner yang telah mengorganisasi “Peristiwa 17 Oktober” 1952, dan masuk dalam Front Nasional yang dibentuk dalam rangka perkembangan tersebut. Gerwis juga ikut memprotes PP 19, dan mendukung tuntutan reform perkawinan yang diajukan Kongres II Kongres Wanita Indonesia tahun 1952. Konferensi kerja Gerwis tahun 1952 di Semarang membahas sekitar permasalahan perdamaian, hak-hak anak dan wanita. Gerwis juga banyak mencurahkan perhatiannya pada masalah pendidikan melek huruf, pembukaan sekolah, dan kursus-kursus PBH (seperti juga organisasi-organisasi wanita lainnya), sampai 1965. Pada pada awal 1952 Gerwani mengajak organisasi wanita Indonesia lainnya untuk ikut merayakan tanggal 8 Maret sebagai hari Solidaritas Perempuan Internasional.

Sejak awal Gerwis merupakan organisasi perempuan yang paling aktif di bidang politik nasional. Dapat dimisalkan ketika Gerwis mengeluarkan pernyataan menentang unsur-unsur reaksioner yang telah melakukan pengorganisasian terhadap peristiwa Oktober 1952. Gerwis juga banyak perhatiannya pada masalah pendidikan dan melek huruf dengan membuka sekolah kursus-kursus. Pada awal tahun 1952 jingga Gerwis mengajak perempuan Indonesia lainnya untuk bekerja sama memperjuangkan RUU Perkawinan,

mengadakan tanggal 8 Maret sebagai hari Solidaritas Perempuan Indonesia, dan kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan langsung kaum perempuan.

Usaha Gerwani dalam menjadi organisasi massa wanita, Gerwis memberi perhatian juga pada sejumlah masalah yang sangat dirasakan kaum wanita, yaitu soal penurunan harga bahan kebutuhan pokok. Ini menyebabkan Gerwis menjadi berbeda dari berbagai organisasi wanita lain saat itu pada umumnya. Pada Kongres II bulan Maret 1954 di Jakarta bertema hak-hak wanita dan anak-anak, kemerdekaan dan perdamaian. Tuntutan tentang perdamaian mencakup baik pendirian anti-imperialisme pada umumnya, dengan mengutuk keras percobaan nuklir, maupun tuntutannya menumpas gerakan Darul Islam, yang sangat anti komunis dan melakukan teror di desa-desa, khususnya di Jawa Barat.

Sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Kongres I, Gerwis diubah menjadi Gerwani. Dengan terpilihnya Umi Sarjono sebagai ketua, berarti sayap feminis berhasil menahan tekanan PKI (Diniah, 2007:97).

Dewan pimpinan pusat yang baru juga mendudukan Suharti sebagai wakil ketua pertama, Ny. Mudigdiyo sebagai wakil ketua kedua; Asiyah dan Darmini sebagai sekretaris; Kartinah, Mawarni, Paryani, dan Suwarti sebagai anggota. Trimurti sudah tidak lagi menjadi anggota dewan ini, melainkan tinggal sebagai anggota pleno yang terdiri dari 35 anggota. Dengan berubah menjadi Gerwani, maka organisasi akan mempunyai kemungkinan lebih besar lagi untuk mengembangkan tanggung jawabnya sebagai gerakan perempuan yang menggalang massa luas, dan berjuang demi hak-hak perempuan dan anak yang masih tertindas. Umi sarjono selaku pimpinan Gerwani juga menekankan pentingnya arti kerja sama dengan berbagai organisasi perempuan lainnya atas dasar menghormati perbedaan yang ada. “Apa pun pendapat kita tentang organisasi dan agama, kita tetap mempunyai kepentingan yang sama dengan organisasi-organisasi perempuan lain tersebut, yaitu untuk menjamin hak-hak sebagai ibu, sebagai pekerja, dan sebagai warga negara, baik di depan undang-undang maupun di dalam praktik sehari-hari” (Diniah, 2007:98)

Organisasi ini telah mengalami perkembangan luar biasa selama tahun-tahun antara Kongres I dan Kongres II. Di Surabaya Gerwis mempunyai 40

cabang dengan 6000 anggota. Pada tahun 1954 jumlah anggota telah naik menjadi sekitar 80.000. Pimpinan Gerwis menekankan arti penting kerja sama dengan berbagai organisasi wanita lain atas dasar menghormati perbedaan yang ada. Organisasi ini menyelenggarakan kursus PBH dan membuka sejumlah tempat penitipan anak. Selain itu juga berusaha mengadakan berbagai kursus kader, tapi rencana ini tertunda karena alasan keuangan, hingga cabang-cabang dibiarkan menatar para kader mereka tanpa menunggu pedoman dari pusat. Kesulitan keuangan juga mengharuskan organisasi menghentikan penerbitan buletin internnya. Buletin ini semula bernama Wanita Sedar, tetapi belakangan diganti Berita Gerwani. Buletin lainnya, Berita Berkala, juga terbit dalam waktu pendek saja (Wierenga, 1999:300-302). Dari berbagai laporan dalam periode Kongres II maka dapat disimpulkan posisi ideologi Gerwani pada 1954. Dalam hal ini keputusannya untuk menjadi organisasi massa jelas terbaca dalam anggaran dasarnya yang baru, yang menyatakan bahwa, pertama Gerwani adalah organisasi untuk pendidikan dan perjuangan, yang tidak menjadi bagian dari partai politik apa pun, kedua keanggotaan Gerwani terbuka untuk semua wanita Indonesia umur 16 tahun atau lebih (atau kurang jika sudah bersuami), dan mengingat sangat banyaknya wanita yang buta huruf, maka untuk menjadi anggota tidak diperlukan tanda tangan atau mengisi formulir, dan ketiga keanggotaan rangkap diperbolehkan, misalnya dengan SOBSI atau organisasi wanita lain apa saja.

Perjuangan untuk penghapusan poligami tetap merupakan masalah penting sampai ketika Presiden Sukarno memadu istri, suatu tindakan yang merupakan pukulan besar bagi gerakan wanita. Timbullah dilema apakah harus mengesampingkan masalah ini, ataukah harus mengecam sang pahlawan bangsa, dengan risiko dicap sebagai anti-nasionalis. Persatuan gerakan wanita menjadi sangat lemah, karena sementara golongan tetap meneruskan perjuangan anti-poligami, dalam hal ini terutama Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI), sedangkan golongan-golongan lain mengabaikan masalah tersebut. Baru pada tahun 1974 undang-undang perkawinan baru disahkan, tetapi karena tekanan golongan Islam poligami masih tetap dipertahankan walaupun agak dibatasi (Wierenga, 1999:222-226).

Gerwani merupakan organisasi yang menghendaki agar kaum perempuan bisa mandiri dan bekerja keras, daripada bergaya hidup santai dan memiliki orientasi hidup kekayaan, namun tetap terkungkung. Gerwani juga sangat menentang perempuan yang menjadi pengikut suami atau hanya sebagai label dari suaminya saja.

Resolusi paling penting yang diterima Kongres II ialah tuntutan akan undang-undang perkawinan yang demokratis. Sejumlah resolusi lain berkenaan dengan pemilihan umum yang akan datang, keamanan nasional, dan protes terhadap percobaan nuklir. Hasil kongres II tersebut kemudian langsung disebarluaskan oleh para aktivis Gerwani kepada semua anggota organisasi, termasuk pada semua kaum perempuan di seluruh pelosok tanah air. Sasaran utamanya adalah untuk menjadikan organisasi ini sebagai “gerakan massa”, dengan harapan anggotanya akan mencapai kurang lebih satu juta pada akhir tahun 1955, meski akhirnya target semula tidak seperti yang diharapkan oleh Gerwani. Dengan demikian Gerwani kemudian menggabungkan antara alasan-alasan esensialisme (sebagai perempuan) dan konstruktivisme (sebagai buruh dan warga negara), dengan memberi tekanan pada persaudaraan kaum wanita.

Para kader Gerwani diwajibkan untuk mempelajari kondisi daerah dan kebudayaan penduduk di wilayah mereka masing-masing. Agar mereka mendapat simpati dari penduduk sekitar karena para kader sudah paham dengan kondisi wilayah mereka masing-masing, dan jika simpati dari para calon anggota sudah didapat, harus dibentuk kelompok-kelompok kecil, dan dari sinilah kaum wanita didorong agar menjadi lebih aktif dan disadarkan tentang hak-hak mereka. Soal perkawinan harus mendapat perhatian utama dari para kader, karena soal ini selalu menarik perhatian wanita.

Perkembangan politik di Semarang tentunya tidak jauh berbeda dengan perkembangan politik pada tingkat nasional. Setelah diadakan pemilihan umum yang pertama tahun 1955 susunan DPRD Tingkat I Jawa Tengah, dengan menempatkan H. Imam Sofwan dan Soemarjo sebagai ketua dan wakil ketua. Pada masa timbulnya Nasakom ditambah lagi dengan seorang wakil ketua yaitu Musajib Adiwino. Pada tanggal 6 Nopember 1960 terjadi perubahan

keanggotaan DPRD yaitu dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong maka jumlah anggotanya ada 35 orang. Terdiri dari wakil-wakil partai politik, wakil tani, wakil kerohaniawan, wakil dari gabungan pembangunan dan ABRI. Sebagai walikotanya yaitu RMS.

Tjondro Koesoemo yang mengakhiri masa tugas tanggal 10 juni 1964, kemudian diganti Wuryanto SH yang menjabat sampai dengan 1 Juni 1966. Dengan meletusnya peristiwa G 30 S, maka anggota-anggota DPRD Gotong Royong dan sebagian anggota Badan Pemerintah Harian mengalami perubahan-perubahan. Anggota-anggota yang berasal dari organisasi politik PKI dan organisasi massanya diganti.

Implementasi nyata bagi kaum perempuan Indonesia dalam bidang politik terasa ketika dalam Pemilu tahun 1955. Dalam Pemilu tersebut, perempuan yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih dan memilih dapat ikut serta dalam kegiatan politik tersebut. Sejak saat itu pula, partisipasi perempuan dalam berbagai lembaga pemerintahan, dari yang rendah sampai yang tinggi serta berkecimpungnya mereka dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik, tidak lagi merupakan hal yang aneh. Setelah berlangsungnya Pemilihan Umum pada tanggal 29 September 1955 dan tanggal 15 Desember 1955, maka pada tanggal 1 Maret 1956 Panitia Pemilihan Indonesia mengumumkan hasil pemilihan umum. Bagi wilayah kota Semarang hasil pemilu dapat dilihat dari tabel berikut ini;

Tabel 4. 3. 1 Hasil Pemungutan Suara Tahun 1955 Untuk Anggota DPR Di Tiap-tiap Kecamatan Kota Semarang

No.	Partai	Semarang					Jumlah
		Barat	Selatan	Timur	Utara	Tengah	
1.	PKI	20.529	11.268	23.731	25.030	16.549	97.089
2.	PNI	4.669	4.050	5.049	4.734	2.983	21.485
3.	NU	4.734	1.433	4.193	4.641	3.912	18.913
4.	Masyumi	1.939	576	825	1.798	1.266	6.431
5.	Baperki	999	199	1.308	4.437	4.536	11.399
6.	Partai Katolik	639	1.157	785	428	629	3.638
7.	Persatuan Pegawai Polisi RI	756	615	629	478	903	3.383

Sumber: (Soekirno, 1956:21)

Pasca kampanye pemilihan umum, pimpinan pusat akhirnya dapat mencurahkan tenaganya lebih besar pada masalah pendidikan aktivis organisasi. Bagi kader yang bekerja di tengah masyarakat, yang tidak senang terhadap wanita yang melepaskan diri dari apa yang mereka anggap sebagai kodrat, atau “sifat kewanitaan”, maka kewajiban rumah tangga mereka tidak boleh dikalahkan oleh pekerjaan di dalam organisasi. Wanita Gerwani menghadapi baik kendala ideologis (agama, kebudayaan, sikap “feodal” pada umumnya dan ketidakpercayaan karena hubungan mereka dengan politik “komunis”), maupun sejumlah hambatan praktis “bagaimana membagi waktu” (Wierenga, 1999:304-306). Untuk mengatasi kendala ini mereka mendapatkan petunjuk dari media massa yaitu *Harian Rakyat*, khususnya melalui “Ruangan Wanita” yang bertuliskan karangan-karangan tentang petunjuk pemeliharaan anggota baru, kemudian tentang mengkombinasikan berbagai tugas organisasi dan rumah tangga, tentang pentingnya kerja keras, dan tentang anjangan, dorongan kepada kader agar setia, cinta kerja, dan bertanggung jawab.

Pemerintah pada tahun 1964 menginstruksikan semua ormas agar mencari gandulan masing-masing pada suatu partai politik. Ketika suasana politik semakin

tegang, pimpinan Gerwani telah menyatakan posisi organisasi yang ada dalam kubu Komunis. Pernyataan yang dimaksud baru akan dirumuskan pada Kongres V. Sementara itu, pada bulan September 1965, saat persiapan Kongres V terus berjalan, di Surabaya dilancarkan demonstrasi besar-besaran menuntut penurunan harga yang diikuti ribuan kaum perempuan (Wierenga, 1999:342). Kemudian pada malam hari tanggal 30 September 1965 atau dini hari tanggal 1 Oktober 1965 terjadilah peristiwa kup yang lebih dikenal dengan Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) atau Gerakan Satu Oktober (Gestok) atau G 30 S/ PKI (menurut versi pemerintah orde baru), yang sampai sekarang masih menjadi teka-teki dan kontroversi. Akhirnya, dengan terjadinya peristiwa tersebut maka berakhir pula kisah perjuangan Gerwani.



BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdirinya Gerwani di kota Semarang di latar belakang oleh beberapa hal yaitu meliputi latar belakang geografis, sosial ekonomi, budaya, politik. Dari segi geografis kota Semarang dipilih karena letaknya yang strategis dimana kota ini dekat dengan pelabuhan dan juga dikenal sebagai kota dagang. Semenjak VOC membangun kawasan ini dan menjadikannya salah satu pusat perdagangan yang paling utama di Jawa. Dan juga kota ini sempat menjadi pusat aktivisme golongan Kiri dan Nasionalis semenjak awal 1920-an. Kota Semarang memiliki dua topologi, yaitu wilayah perbukitan (kota atas) dan lembah atau daratan (kota bawah) yang berbatasan langsung dengan laut. Gerwani memulai persemaian awal organisasinya melalui daerah perbukitan dahulu karena dianggap masih pelosok sehingga lebih mudah untuk menyebarkan ideologinya yang kemudian menjalar ke daerah lembah atau daerah kota. Pemilihan kota atas sebagai persemaian awal juga didasari untuk memudahkan langkah Gerwani dalam melebarkan sayap karena di kota atas masyarakatnya lebih mudah direkrut.

Dari sosial ekonomi, kota Semarang lebih mengarah pada kota perdagangan, hal ini karena tempat perbelanjaan yang sekian banyak sehingga masyarakat Semarang lebih memilih berdagang daripada bertani. Oleh sebab itu Gerwani memilih daerah perbukitan dahulu sebagai titik awal penyebaran ideologinya, ditambah lagi penataan kota Semarang berdasarkan pada kelas ekonomi sehingga Gerwani memulai persemaiannya dimulai dari masyarakat atau lingkungan yang miskin. Kota bawah waktu itu merupakan tempat yang sangat ramai dan cepat pertumbuhannya sehingga menjadikan ideologi Gerwani ini mudah sampai ketelinga masyarakat umum, sehingga Gerwani mampu tumbuh dan berkembang dengan cepat. Apalagi ditambah dengan Semarang sebagai kota perdagangan yang menambah cepat laju penyebaran mengenai aktivitas Gerwani ke berbagai daerah. Sedangkan dari segi budaya di kota Semarang sudah terdapat kelompok-kelompok kesenian antara lain Karawitan, Tari Jawa, Wayang Orang, Ketoprak, Orkes Keroncong, Band, Gambus, Orkes Melayu, Samroh, Drama atau

Sastra, Dalang, Waranggono, Biduan Keroncong, dan lain-lain, sehingga memudahkan para anggota Gerwani menyebarkan ideologinya, terlebih lagi Gerwani di kota Semarang bersama golongan Lekra mengadakan operasi “Gempa Langit III”. Markas dari operasi ini di sebuah gang sempit di sebelah pasar Johar Semarang. Operasi ini dipimpin oleh Martian, seorang pelukis. Daerah yang menjadi sasaran operasi ini adalah wilayah Tambaklorok dan gang-gang kumuh di kota Semarang. Operasi Gempa Langit II merupakan bentuk turba (turun ke bawah) para seniman bersama rakyat. Realitas sosial di masyarakat akan menjadi ilham dari karya mereka. Hasil akhir dari gerakan turba ini kemudian dipamerkan di Semarang dan dibuka oleh Kepala Daerah kota Semarang.

Dari segi politik, pada 4 Juni 1950 para wakil enam organisasi wanita berkumpul di Semarang untuk melebur enam organisasi mereka masing-masing ke dalam satu wadah tunggal, yaitu Gerwis. Enam organisasi tersebut ialah Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan. Kota Semarang dipilih sebagai basis Gerwis, karena secara historis merupakan “Kota Merah” di kota inilah lahirnya PKI. Pada Kongres ke II bulan Maret 1954 bertema hak-hak wanita dan anak-anak, kemerdekaan dan perdamaian. Sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Kongres I, Gerwis diubah menjadi Gerwani. Inilah latar belakang kelahiran Gerwani yang dimaksudkan menghilangkan kesan karakteristik sempit dari Gerwis, maksudnya ialah dengan adanya perubahan nama maka siapapun dan dimanapun dia berasal bisa menjadi anggota dari Gerwani. Berbeda pada awalnya dulu sewaktu namanya masih Gerwis yang bisa menjadi anggotanya hanyalah istri dari PKI dan wanita-wanita Jawa saja. Dengan perubahan nama ini juga maka organisasi akan mempunyai lebih besar lagi tanggung jawabnya sebagai gerakan perempuan yang menggalang massa luas, dan berjuang demi hak-hak anak dan perempuan yang tertindas. Dalam sebuah organisasi, anggota adalah penggerak penting organisasi.

Gerwani menjadikan organisasinya sebagai organisasi massa yang terbuka dalam menerima kaum perempuan yang ingin bergabung, dan berjuang dengan

kader-kader dan anggota-anggota sebelumnya yang sudah terlibat dalam Gerwani. Susunan keanggotaan Gerwani di Semarang memiliki empat tingkatan, yaitu simpatisan, calon anggota, anggota, dan kemudian kader. Keanggotaan rangkap atau ikut lebih dari satu organisasi diluar Gerwani juga diperbolehkan, misalnya ikut dalam SOBSI, Aisiyah atau organisasi perempuan lainnya. Seperti tercantum dalam Peraturan Dasar Gerwani Bab III tentang keanggotaan Pasal 3, yaitu “yang dapat diterima menjadi anggota ialah setiap wanita warga Negara Indonesia (WNI) yang berumur 16 tahun ke atas atau mereka yang sudah menikah, yang menyetujui program dan perjuangan Gerwani dan dengan tidak membedakan aliran politik, agama, suku-bangsa serta masuknya sebagai anggota atas dasar sukarela”.

Kegiatan Gerwani di kota Semarang sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam Program-Program Kerja Gerwani. Meskipun program-program kerja tersebut baru dibuat dan dikeluarkan pada tahun 1964, namun sebelumnya sudah diterapkan di daerah-daerah termasuk di kota Semarang. Program kerja Gerwani di kota Semarang antara lain membentuk koperasi-koperasi sampai ke tingkat desa dan membantu usaha-usaha rumah tangga (misalnya menjahit, memasak, kerajinan tangan, dan industri-industri kecil lainnya).

Kemudian Gerwani kota Semarang sering melakukan demonstrasi menuntut penurunan harga barang-barang pokok. Selain itu Gerwani kota Semarang juga membentuk beberapa Sekolah Rakyat (sekarang SD) untuk membantu program pemerintah mengenai pemberantasan buta huruf. Bentuk penindasan yang dialami anggota-anggota Gerwani kota Semarang terjadi pada kurun waktu bulan Oktober tahun 1965. Proses penangkapan anggota Gerwani memiliki pola tertentu, mereka awalnya dibawa ke kecamatan masing-masing baru kemudian dibawa ke penjara wanita Bulu selama kurang lebih 5 tahun (1966-1971). Pada tahun 1971 anggota-anggota Gerwani yang ditahan di penjara wanita Bulu dipindahkan ke Plantungan Kendal.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa calon guru sejarah, selain berusaha lebih mandalami dan menguasai materi sejarah akan lebih baik jika dapat menilai Sejarah secara Objektif
2. Bagi sejarawan, hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sumbangan pikiran untuk mengadakan penelitian mengenai sejarah Nasional Indonesia. Khususnya pada masa setelah Proklamasi tentang organisasi perempuan.
3. Bagi almamater, ada baiknya jika menambah dan meningkatkan perbendaharaan literatur tentang kajian sejarah nasional Indonesia di perpustakaan, khususnya buku tentang Golongan Kiri agar dapat membantu mahasiswa dan sejarawan meningkatkan penelitian dan profesionalismenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T . 1985. *Sejarah lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Abdullah, T& A Surjomihardjo, eds.1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Anonim. 1953. *Republik Indonesia: Propinsi Jawa Tengah*. Semarang: Kementrian Penerangan RI.
- Anonim. 1965. *Ungkapan Fakta-Fakta Sekitar Peristiwa G30S di Jateng*. Semarang: Angkatan Darat Kodam VII/Diponegoro.
- Anonim. 1971. *Sirnaning Jekso Katon Gapuraning Ratu*. Semarang: Sejarah TNI-AD Kodam VI/Diponegoro.
- Agger, B. 2007. *Teori Sosial Kritis. Terjemahan oleh Nurhadi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Blackburn, S. 2007. *Kongres Perempuan Pertama*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budihardjo, M. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dahlan, AB. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Darban, A. 2010. *'Aisyiyah Dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Sebuah Tinjauan Awal*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM.
- Diniah, H.2007. *Gerwani Bukan PKI, Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: Carasvati Books.
- Duverger, M. 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Irwan, ZD. 2009. *Besarnya Eksploitasi Perempuan Dan Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kartodirdjo, S. et al.1977. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: P&K.
- Koentjaraningrat. 1971. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Jambatan.

- Kongres Wanita Indonesia. 1978. *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Murniati, A. 2004. *Getar Gender, Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*. Magelang: Indonesia Tera.
- Nadia, IF. 2009. *Suara Perempuan Korban Tragedi '65*. Yogyakarta: Galangpress
- Notosusanto, N. et al. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. (Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Primariantari, R. dkk. 1998. *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pringgodigdo, AK. 1994. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Ricklefs, MC. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridjal, F dkk. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Soekanto, S. 1969. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Soekarno. 1963. *Sarinah*. Yogyakarta: Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Sukarno.
- Soekirno, 1956. *Semarang*. Semarang: Departemen Penerangan Kota Besar Semarang.
- Soenaryo, et al. 1972. *Mengenal Kotamadya Semarang II*. Semarang: Pemerintah Daerah.
- Subhan, SD. 1996. *Langkah Merah: Gerakan PKI, 1950-1955*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Suratmin. 1991. *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

Suseno, FM. 2001. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suwondo, N. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Utomo, CB. 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press

Wibisono, C. et al. 1982. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah. Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kurnia Era.

Wierenga, SE. 1998. *Kuntulanak Wangi*. Jakarta: Kalyanamitra.

Wierenga. SE. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya.

Skripsi;

Rahmawati, R. 2008. *“Keberadaan Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) Cabang Blitar Tahun 1957-1965”*. Fakultas Sastra: Universitas Jember.

Informan:

1. Nama : Sunitri
Umur : 78 tahun
Alamat : Sampangan, Semarang
Jabatan : Mantan anggota Gerwani
2. Nama : Surti
Umur : 75 tahun
Alamat : Kali Wungu, Kendal
Jabatan : Mantan anggota gerwani sebagai guru taman kanak-kanak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T . 1985. *Sejarah lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Abdullah, T& A Surjomihardjo, eds.1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Anonim. 1953. *Republik Indonesia: Propinsi Jawa Tengah*. Semarang: Kementrian Penerangan RI.
- Anonim. 1965. *Ungkapan Fakta-Fakta Sekitar Peristiwa G30S di Jateng*. Semarang: Angkatan Darat Kodam VII/Diponegoro.
- Anonim. 1971. *Sirnaning Jekso Katon Gapuraning Ratu*. Semarang: Sejarah TNI-AD Kodam VI/Diponegoro.
- Agger, B. 2007. *Teori Sosial Kritis. Terjemahan oleh Nurhadi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Blackburn, S. 2007. *Kongres Perempuan Pertama*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budihardjo, M. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dahlan, AB. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Darban, A. 2010. *'Aisyiyah Dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Sebuah Tinjauan Awal*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM.
- Diniah, H.2007. *Gerwani Bukan PKI, Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: Carasvati Books.
- Duverger, M. 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Irwan, ZD. 2009. *Besarnya Eksploitasi Perempuan Dan Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kartodirdjo, S. et al.1977. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: P&K.
- Koentjaraningrat. 1971. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Jambatan.

- Kongres Wanita Indonesia. 1978. *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Murniati, A. 2004. *Getar Gender, Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*. Magelang: Indonesia Tera.
- Nadia, IF. 2009. *Suara Perempuan Korban Tragedi '65*. Yogyakarta: Galangpress
- Notosusanto, N. et al. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. (Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Primariantari, R. dkk. 1998. *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pringgodigdo, AK. 1994. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Ricklefs, MC. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridjal, F dkk. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Soekanto, S. 1969. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Soekarno. 1963. *Sarinah*. Yogyakarta: Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Sukarno.
- Soekirno, 1956. *Semarang*. Semarang: Departemen Penerangan Kota Besar Semarang.
- Soenaryo, et al. 1972. *Mengenal Kotamadya Semarang II*. Semarang: Pemerintah Daerah.
- Subhan, SD. 1996. *Langkah Merah: Gerakan PKI, 1950-1955*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Suratmin. 1991. *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

Suseno, FM. 2001. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suwondo, N. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Utomo, CB. 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press

Wibisono, C. et al. 1982. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah. Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kurnia Era.

Wierenga, SE. 1998. *Kuntulanak Wangi*. Jakarta: Kalyanamitra.

Wierenga. SE. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya.

Skripsi;

Rahmawati, R. 2008. *“Keberadaan Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) Cabang Blitar Tahun 1957-1965”*. Fakultas Sastra: Universitas Jember.

Informan:

3. Nama : Sunitri
Umur : 78 tahun
Alamat : Sampangan, Semarang
Jabatan : Mantan anggota Gerwani
4. Nama : Surti
Umur : 75 tahun
Alamat : Kali Wungu, Kendal

Jabatan: Mantan anggota gerwani sebagai guru taman kanak-kanak

Lampiran A. Matrik Penelitian

Topik	Judul Penelitian	Jenis Data Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
1	2	3	4	5	6
Sejarah Indonesia	Dinamika Gerwani Di Kota Semarang Tahun 1954-1965	a. Jenis Penelitian: Sejarah b. Sifat Penelitian: Studi Pustaka dan <i>Inteviuw</i>	a. Bagaimana latar belakang berdirinya organisasi Gerwani di kota Semarang? b. Bagaimana dinamika oranisasi, keanggotaan dan program kerja Gerwani di kota Semarang pada tahun 1954 sampai pada tahun 1965?	a. Buku b. Wawancara c. Skripsi Terdahulu	Metode penelitian sejarah dengan tahap: a. Pemilihan Topik b. Heuristik c. Kritik (Verivikasi) d. Interpretasi e. Historiografi